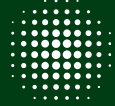
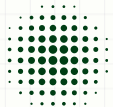




# LAKIP 2025



Laporan Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah  
**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KONAWE UTARA**



**2025**



Presented by  
**Sub Program , Informasi dan Humas**

[dinaskesehatan@konaweutarakab.go.id](mailto:dinaskesehatan@konaweutarakab.go.id)

<https://dinkes.konaweutarakab.go.id/>



# Ikhtisar Eksekutif



Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan seluruh aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan hasil pengukuran kinerja.

Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik dan pemberi mandat, laporan kinerja ini juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja ditahun-tahun yang akan datang. Sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 telah ditetapkan 2 sasaran strategis **“Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat”** dan **“Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan”** yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara yang dihasilkan pada Tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	%
1. Capaian SPM Bidang Kesehatan	100	83.07	83.07
2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	94%	100.56	106.97
3. Persentase Peningkatan RSUD dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna	34.78	34.78	100
<b>Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja</b>	<b>96.68%</b>	<b>574</b>	<b>100</b>



# Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud nyata pertanggungjawaban kami dalam mengemban amanah serta menjalankan tugas pelayanan publik sepanjang tahun anggaran 2025.



Penyusunan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui laporan yang transparan mengenai penggunaan anggaran, waktu, serta sumber daya manusia yang ada.

Dalam prosesnya, laporan ini mengacu pada aturan resmi pemerintah (PERMENPAN & RB No. 53 Tahun 2014) serta target yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029. Isinya memuat gambaran jujur mengenai pencapaian yang telah diraih maupun hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Harapannya, laporan ini bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga. Dengan begitu, kinerja Dinas Kesehatan di masa depan bisa terus diperbaiki agar lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Wanggudu, 20 Februari 2026



Rt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Konawe Utara

**ASKAM, S.Sos**

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19680928 198904 1 002



# Daftar Isi

## BAB 01 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	Hal. 7
1.2 Dasar Hukum	Hal. 8
1.3 Maksud dan Tujuan	Hal. 10
1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	Hal. 12
1.5 Isu Strategis Dinas Kesehatan	Hal. 20
1.6 Cascading Kinerja	Hal. 24
1.7 Sistematika Penulisan	Hal. 26

## BAB 02 PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis	Hal. 27
2.2 Perjanjian Kinerja	Hal. 35

## BAB 03 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi	Hal. 39
3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	Hal. 40
3.3 Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024	Hal. 41
3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra	Hal. 42
3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Standar nasional	Hal. 43
3.6 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	Hal. 45
3.7 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program dan Indikator Program	Hal. 51
3.8 Capaian Kinerja Lainnya	Hal. 68
3.9 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Hal. 80
3.10 Inovasi	Hal. 82

## BAB 04 PENUTUP

Kesimpulan dan Langkah Perbaikan Strategis	Hal. 88
--	---------





# Daftar Tabel

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1	2	3
1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025	15
1.2	Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
1.3	Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan	16
2.1	Tujuan Sasaran Strategis Indikator dan Target Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 (Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan)	32
2.2	Sasaran Strategis, Strategi, Program dan Kegiatan Tahun 2025	33
2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	36
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	40
3.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	40
3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024	41
3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra	42
3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	44
3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	52
3.7	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	69
3.8	Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran Strategis	72
3.9	Realisasi Anggaran Lainnya	75
3.10	Realisasi Anggaran RSUD Konawe Utara	76
3.11	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	80



# Daftar Grafik

Nomor	Judul Grafik	Halaman
1	2	3
1.1	Jumlah Tenaga Medis di kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	17
1.2	Jumlah Tenaga kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	17
3.1	Perbandingan Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023-2025	45
3.2	Perbandingan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023-2025	48
3.3	Perbandingan Persentase Peningkatan RSUD dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna Tahun 2023-2025	50
3.4	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	59

# Bab I Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk menelaraskan setiap kegiatan dengan anggaran yang tersedia guna mencapai hasil kerja yang nyata bagi masyarakat.

Laporan Kinerja ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan yang utuh. Dimulai dari rencana jangka panjang (RPJM), yang kemudian diturunkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029. Dari Renstra tersebut, Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dibiayai melalui RKA dan DPA sebagai dasar pelaksanaan kerja di lapangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Kesehatan memiliki mandat untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.





Pada tahun 2025, pelaksanaan tugas tersebut difokuskan untuk mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, yaitu:

1. Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
2. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

Seluruh rencana tersebut dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja ini hadir untuk menjawab sejauh mana pemenuhan janji-janji dalam perjanjian tersebut. Di dalam laporan ini, dilakukan pengukuran atas capaian kerja yang telah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan analisis dan evaluasi untuk

melihat apa saja yang sudah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki.

Hasil dari evaluasi dalam laporan ini sangat penting karena berfungsi sebagai arus balik (*feedback*) bagi organisasi. Dengan adanya masukan ini, Dinas Kesehatan dapat melakukan perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) agar perencanaan di tahun-tahun mendatang menjadi lebih baik, lebih tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesehatan masyarakat di Kabupaten Konawe Utara.

## 1.2 Dasar Hukum



- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;



- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029;
- Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara;
- Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025.



## 1.3 Maksud dan Tujuan

### 1.3.1 Maksud



Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan program, kegiatan, dan pemanfaatan anggaran dalam rangka mencapai target strategis yang telah ditetapkan. Adapun secara detail maksud dari penyusunan adalah sebagai berikut:



#### Memenuhi Kewajiban Pelaporan

Menjalankan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 mengenai kewajiban instansi pemerintah untuk melaporkan kinerja secara periodik.



#### Menyediakan Data Capaian

Memberikan gambaran riil mengenai realisasi indikator kinerja utama (IKU) bidang kesehatan dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renja, Renstra dan Perubahan RKPD, dan RPJMD 2025-2029.



#### Pendorong Perbaikan Berkesinambungan (*Continuous Improvement*)

Berfungsi sebagai sarana evaluasi dan pendorong untuk melakukan perbaikan tata kelola secara berkesinambungan dalam pengembangan program kerja untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang

### 1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

#### 1. Mewujudkan Akuntabilitas

Menunjukkan transparansi dan tanggung jawab Dinas Kesehatan kepada Bupati Konawe Utara dan masyarakat atas mandat yang diberikan sesuai SOTK Dinas Kesehatan (Perbup 10/2022).

#### 2. Bahan Evaluasi Kinerja

Menjadi dokumen utama bagi inspektorat atau tim penilai dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja.

#### 3. Mengukur Keberhasilan Strategis

Menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rencana kerja dinas kesehatan dalam mendukung visi misi kepala daerah, dan sasaran strategis Dinas Kesehatan yang tertuang dalam RENSTRA dan RPJMD Konawe Utara 2025-2029.

#### 4. Umpan Balik Perencanaan (Feed-back):

Sebagai dasar dalam melakukan perbaikan perencanaan pembangunan daerah (sesuai prinsip Permendagri 86/2018) dan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran.

#### 5. Peningkatan Pelayanan Publik

Mendorong Dinas Kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui sistem manajemen kinerja yang terukur dan kompetitif.





## 1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

### 1.4.1 Kedudukan

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara menyatakan bahwa Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



\*Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan



### 1.4.2 Tugas Pokok

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya dinas menyelenggarakan fungsi:



Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Pelaksanaan pembinaan penunjang medis, sarana, peralatan kesehatan, promosi dan peran serta masyarakat;



Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pembangunan kesehatan, pengolahan data informasi kesehatan serta penelitian dan pengembangan kesehatan;



Pelaksanaan pembinaan manajemen program dan pengembangan sumber daya kesehatan;



Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dinas;



Pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit masalah kesehatan;



Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

### 1.4.3 Fungsi

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

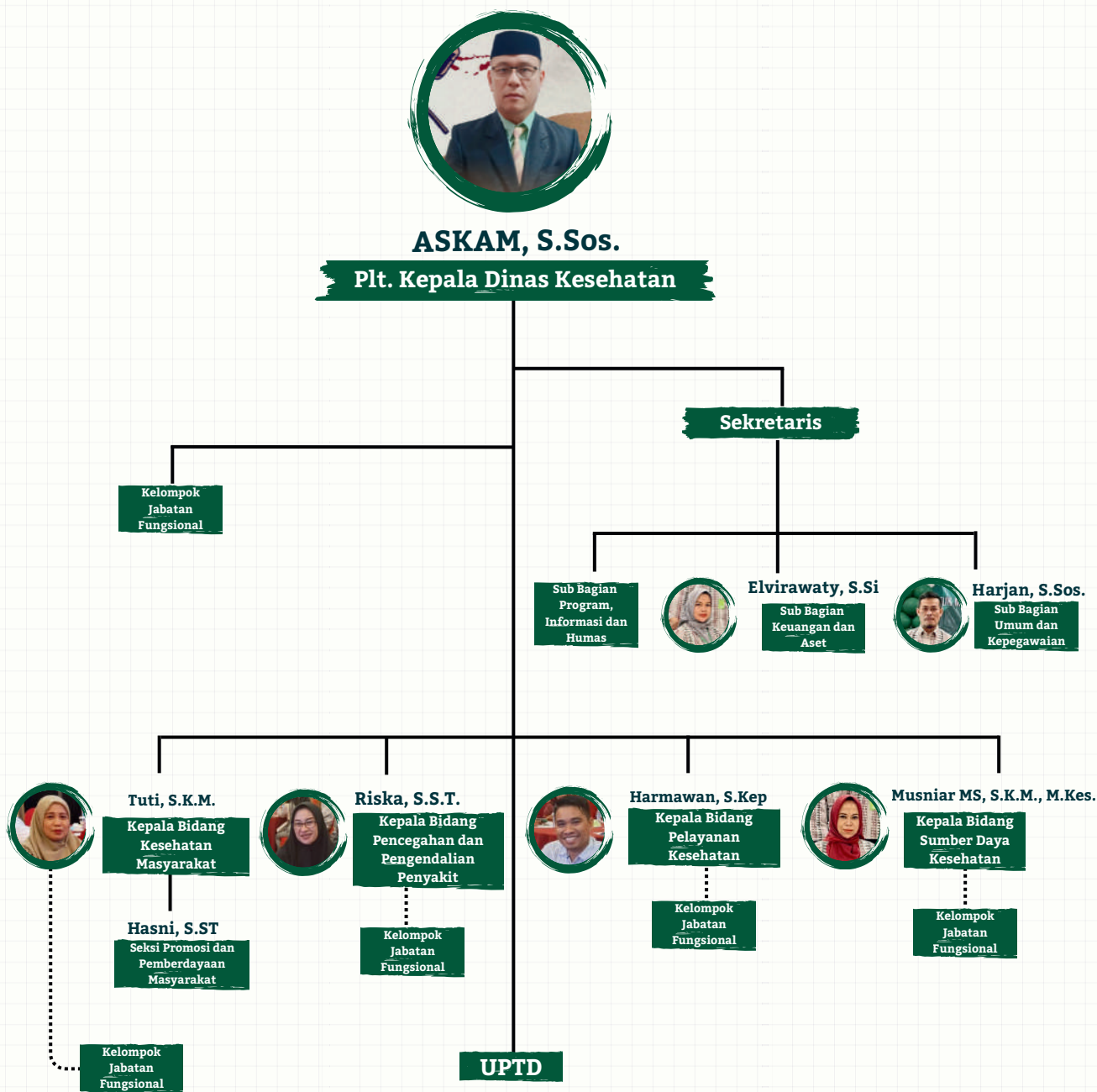




### 1.4.4 Tugas Pokok

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

**Bagan 2.1** Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Tahun 2025





### 1.4.5 Kondisi Pegawai



Kondisi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara update per Juli Tahun 2025 adalah sebanyak 1035 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaiannya dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1** Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025

No	Status Pegawai	Jumlah	
		Dinas Kesehatan	Puskesmas
1.	PNS	70	392
2.	CPNS	1	20
3.	PPPK	14	538
Total		85	950

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 terlihat distribusi jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaiannya mayoritas pegawai di Puskesmas adalah PPPK, menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada tenaga kontrak. Sementara itu, di Dinas Kesehatan jumlah PNS yang paling dominan dibandingkan dengan status kepegawaian lainnya. Secara keseluruhan, Puskesmas memiliki jumlah total pegawai yang jauh lebih besar dibandingkan Dinas Kesehatan.

**Tabel 1.2** Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Dinas Kesehatan		Puskesmas	
		PNS	PPPK	PNS	PPPK
1.	S3	0	0	0	0
2.	S2	15	0	90	82
3.	S1	50	11	206	108
4.	D3	2	2	130	372
5.	SMA	3	0	15	0
6.	SMP	1	0	0	0
Total		71	13	441	562

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, 2025



Berdasarkan Tabel 2.2, menunjukkan bahwa di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas didominasi oleh lulusan pendidikan S1 dan D3. Untuk pegawai dengan status PNS, jumlah terbanyak adalah lulusan S1 (256 orang) dan D3 (132 orang). Sementara itu, pegawai dengan status PPPK mayoritas adalah lulusan D3 (374 orang) dan S1 (119 orang). Sedangkan distribusi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

**Tabel 1.3** Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	IV				III				II			I	Non Golongan
		A	B	C	D	A	B	C	D	B	C	D	C	
1.	Dinas Kesehatan	12	8	0	0	12	7	6	21	3	0	1	1	13
2.	Puskesmas	20	9	0	0	142	61	35	58	4	78	16	0	519
Total		32	17	0	0	154	67	41	79	7	78	17	1	522

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, 2025

Pegawai didominasi oleh kelompok Non Golongan sebanyak 522 orang, sebagian besar bertugas di Puskesmas. Sedangkan kelompok Golongan III adalah yang terbanyak (381 orang). Sebaliknya, pegawai di Golongan I/C hanya ada 1 orang, golongan (IV/C, IV/D) tidak ada pegawai sama sekali (0).

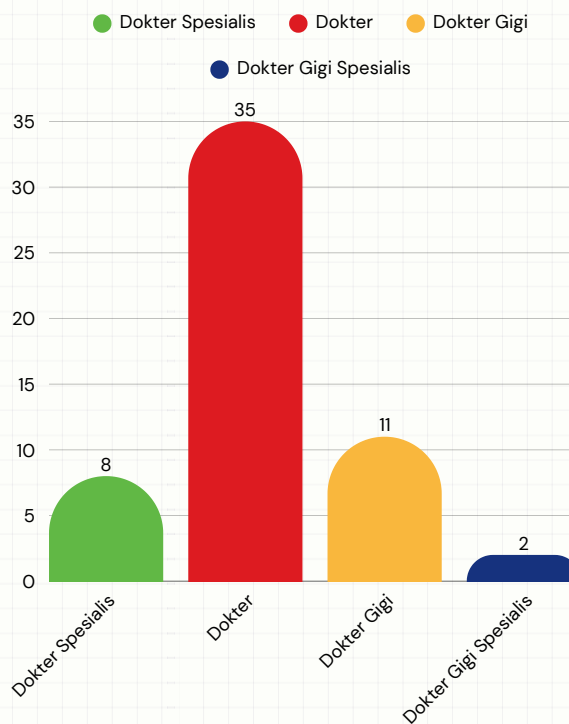
Sebagai instansi yang diamanahkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Guna menjalankan mandat tersebut, Dinas Kesehatan harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan terdiri atas Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan. Adapun sumber daya manusia kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, terdiri atas:

Tenaga Medis terdiri atas dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspecialis. Adapun jumlah tenaga medis di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada grafik berikut:



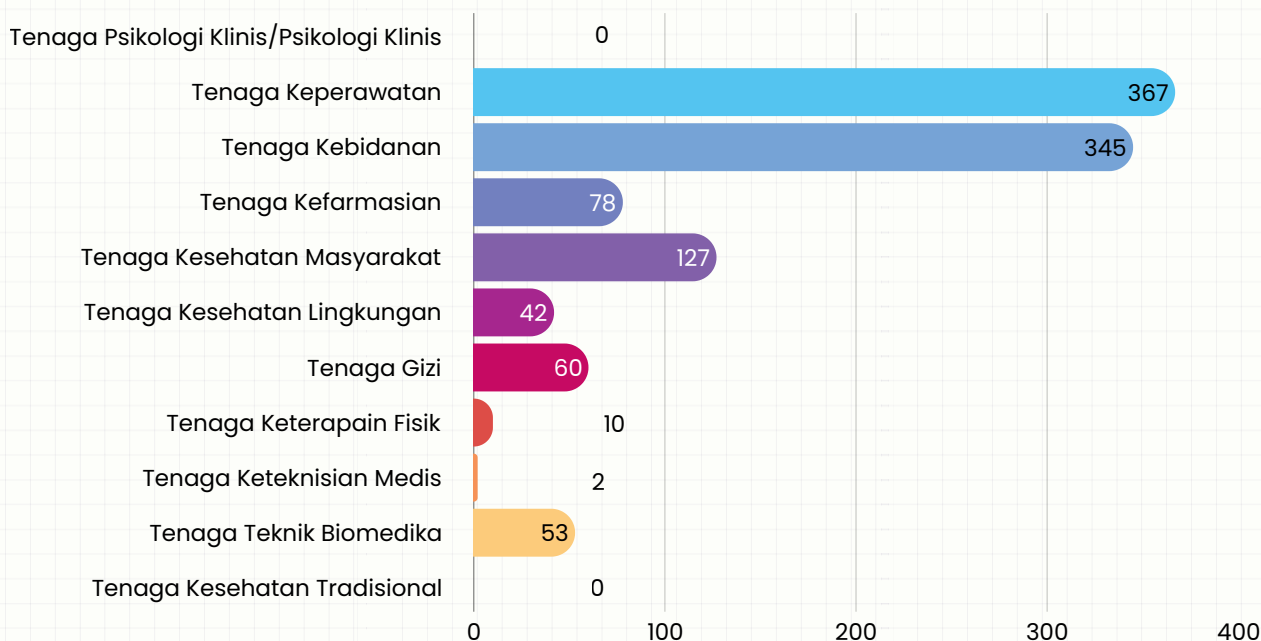
Berdasarkan grafik disamping, total jumlah dokter yang ada di Kabupaten Konawe Utara sebanyak 56 orang. Terlihat bahwa jumlah dokter umum jauh melampaui jenis tenaga medis lainnya. Proporsi dokter spesialis, baik medis maupun gigi, relatif kecil dibandingkan dengan total keseluruhan tenaga medis yang ada. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa fasilitas kesehatan di Konawe Utara memiliki kekuatan utama pada dokter umum, namun perlu evaluasi lebih lanjut mengenai kecukupan dan ketersediaan dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang lebih kompleks.

Grafik 1.1 Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024



Sumber: Profil Kesehatan Konawe Utara Tahun 2024

**Grafik 1.2** Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024



Sumber: Profil Kesehatan Konawe Utara, 2024



### 1.4.6 Sarana dan Prasarana

Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara telah didukung dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang cukup memadai. Baik berupa bangunan, peralatan kantor, kendaraan roda dua dan roda empat, ambulans, serta kapal yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh diseluruh pelosok Kabupaten Konawe Utara.

Berdasarkan Data ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan) Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 bahwa dari 22 Puskesmas yang ada 6 Puskesmas memiliki presentase kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alkes mencapai 50%-61%. Sedangkan 16 Puskesmas memiliki presentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alkes pada rentang 24%-49%. Secara keseluruhan SPA Dinas Kesehatan adalah 44,53% sedangkan SPA RSUD 73,65%.

Khusus Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara telah dilengkapi dengan fasilitas cukup



memadai yaitu terdapat gedung Kantor, Aula, Musholah, Gudang Obat, Lapangan, Gazebo, Ruang Laktasi bagi Ibu Hamil dan Menyusui, serta terdapat Pojok Ramah Anak Indoor dan Outdoor.

Pada Tahun 2025 Dinas Kesehatan telah mengadakan sarana yaitu Kursi Futura 279 Unit, Mikroskop 2 Unit, Motor 28 Unit, Printer 6 Unit, AC 8 Unit, Meja Biro 56 Unit, Laptop 6 Unit, Proyektor 1 Unit, Meja Palet 47 Unit, *Electric Stackers* 1 Unit, *Platform Handtruck* 4 Unit, APAR 5 Unit, Alarm Kebakaran 8 Unit, Komputer PC 23 Unit, Scanner 1 Unit, Sound System 1 Set 1 Unit, TV 1 Unit, Kipas Angin 2 Unit, Genset 100 KVA 1 Unit, Lemari Penyimpanan 9 Unit, Lift Barang 1 Unit, Rak Susun Penyimpanan Obat 1 Unit, Lemari Arsip 100 Unit, Kursi Putar 50 Unit, Lemari Loker 40 Unit.





Untuk pengadaan prasarana pada Tahun 2025 antara lain:

1.	Rehabilitasi Perumahan Puskesmas Landawe;	7.	Pembangunan Perumahan Puskesmas Hialu;
2.	Pembangunan Perumahan Dokter Puskesmas Lamparinga;	8.	Penambahan Gedung Puskesmas Oheo;
3.	Rehabilitasi Perumahan Puskesmas Matandahi;	9.	Penambahan Gedung Puskesmas Paka Indah;
4.	Lanjutan Rehabilitasi Perumahan Puskesmas Hialu;	10.	Pembangunan Labkesda Kabupaten Konawe Utara;
5.	Pembangunan Gedung Ponok Puskesmas Andowia;	11.	Pekerjaan Paving Blok Puskesmas Matandahi;
6.	Pembangunan Gedung Ponok Puskesmas Wanggudu Raya;	12.	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Bersih Puskesmas (Zoomba Mobile WTP Up to 1000 Lph) 3 Unit;
		13.	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas 4 Unit.

Sumber: Bendahara Barang Dinas Kesehatan, 2026

### 1.4.7 Keuangan



Pembiayaan untuk belanja kesehatan di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2025 bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Utara dan APBN. Dukungan dana ini diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung operasional.

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan beserta 22 Puskesmas mengelola total anggaran sebesar Rp133.496.333.419,37, di mana porsi anggaran khusus untuk Dinas Kesehatan adalah sebesar Rp108.646.442.823,07. Dari jumlah tersebut, dana yang berhasil direalisasikan adalah sebesar Rp91.914.464.540,00 atau mencapai 84,60%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi keuangan tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, total anggaran gabungan mencapai Rp191.318.635.889 dengan porsi Dinas Kesehatan sebesar Rp165.309.974.293. Hal ini menunjukkan adanya penurunan alokasi anggaran sekitar 30% hingga 34% pada tahun 2025.



Penurunan alokasi dana ini menjadi tantangan bagi Dinas Kesehatan untuk tetap memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan tetap memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Konawe Utara secara efektif dan akuntabel.

## 1.5 Isu Strategis Dinas Kesehatan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis Dinas Kesehatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena memiliki dampak signifikan dan luas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan bila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu-isu yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, sebagai berikut:

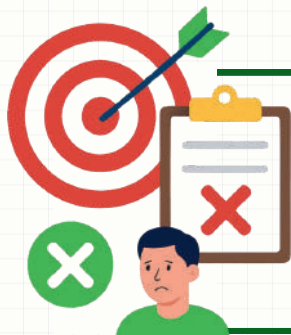


Akses masyarakat terhadap upaya-upaya pencegahan, pendeteksian, dan penanganan/pengobatan penyakit menular semakin perlu didekatkan dan dipercepat.



Beban ganda permasalahan gizi masyarakat (*wasting, stunting, obesitas*) yang semakin meluas pada usia balita dan berlanjut pada usia pendidikan dasar serta usia produktif perlu didukung dengan upaya pengendalian malnutrisi terintegratif serta pelaksanaan upaya-upaya keamanan pangan termasuk dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi.

Meningkatkan dan menjaga efektivitas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) penduduk dan terus diimbangi dengan upaya-upaya inovasi perluasan manfaat pelayanan kesehatan lain di luar penjaminan JKN seperti promotif dan preventif.



Belum terpenuhinya mutu dan penetapan sasaran penerima layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan oleh Kepala Daerah sehingga beberapa target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan belum tercapai.

Penguatan dan penjaminan mutu layanan dengan mempertahankan status Akreditasi Paripurna pada Puskesmas dan Rumah Sakit yang sudah mencapainya dan mengakselerasi peningkatan seluruh Puskesmas lainnya menuju level Paripurna, sehingga sistem manajemen mutu, kualitas dan kinerja pelayanan kesehatan daerah tercapai secara merata.



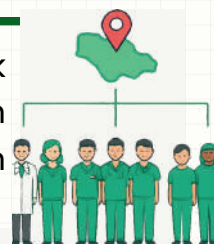


Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang mendukung peningkatan kualitas layanan serta perubahan tipe RSUD dari D menjadi C.



Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di fasilitas pelayanan kesehatan terutama puskesmas dan RSUD yaitu 9 jenis tenaga kesehatan dan 7 dokter spesialisasi dasar belum memenuhi standar untuk melaksanakan pelayanan secara maksimal sesuai dengan pengembangan/prioritas layanan.

Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan tidak proporsional, di mana penumpukan tenaga kesehatan terjadi di perkotaan dan menyebabkan ketimpangan akses layanan yang signifikan di daerah terpencil.



Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) perlu ditingkatkan dan difokuskan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan kesehatan melalui perencanaan dan pemenuhan peningkatan pendidikan dan pelatihan.

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dan Imunisasi Baduta Lengkap (IBL) perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas SDM, pemenuhan logistik dan administrasi serta peningkatan pemahaman masyarakat dan miskonsepsi tentang manfaat penting imunisasi untuk perlindungan dari penyakit





Angka kematian ibu, neonatus, bayi, dan balita sudah di bawah angka target nasional namun perlu penguatan pada beberapa aspek untuk memastikan tidak terjadi kematian pada ibu, neonatus, bayi, dan balita melalui peningkatan kapasitas serta standar kualitas sarana, prasarana, dan SDM fasilitas kesehatan antara lain memastikan puskesmas menjalankan kriteria PONEK 24 Jam, RSUD menjalankan kriteria PONEK 24 Jam, pelaksanaan kebijakan audit maternal & perinatal, serta jejaring fasilitas kesehatan rujukan yang responsif terhadap kasus kedaruratan maternal & perinatal.

Penyakit tidak menular akan terus meningkat, menyumbang pada kematian dan disabilitas (penyakit jantung, stroke, diabetes mellitus, kanker). PTM lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah kesehatan mental, kesehatan kerja (meningkatnya penyakit yang terkait dengan pekerjaan a.l. back pain, mental health, etc) serta Peningkatan penduduk lansia (*ageing population*) meningkatnya PTM & penyakit degenerative, sehingga perlu layanan terpadu, *long-term healthcare*. dan Dominasi penduduk usia produktif dgn mobilitas tinggi health security, kesehatan mental, penanganan cedera, kesehatan kerja, kesehatan reproduksi & KIA, serta mendorong pola hidup sehat: faktor risiko & peningkatan PTM serta Pendekatan pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup

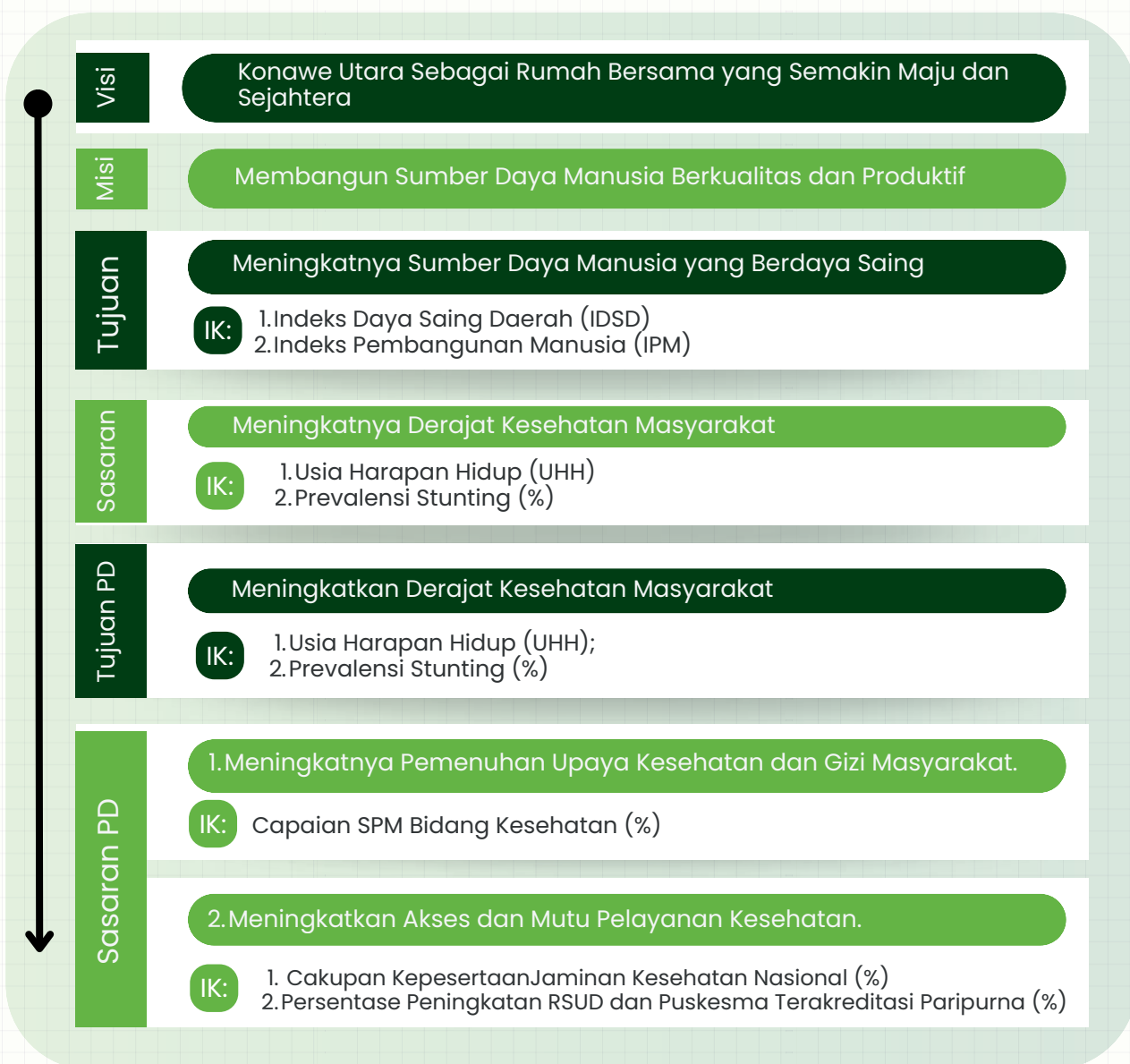
Belum optimalnya efektivitas tata kelola di Dinas Kesehatan akibat masalah kompetensi SDM yang tidak berbasis merit, inefisiensi birokrasi dan mentalitas silo, serta keterbatasan anggaran untuk peningkatan fasilitas dan kapasitas.





## 1.6 Cascading Kinerja

Cascading Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Proses ini memastikan bahwa setiap aktivitas di tingkat teknis berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi daerah. Adapun Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:





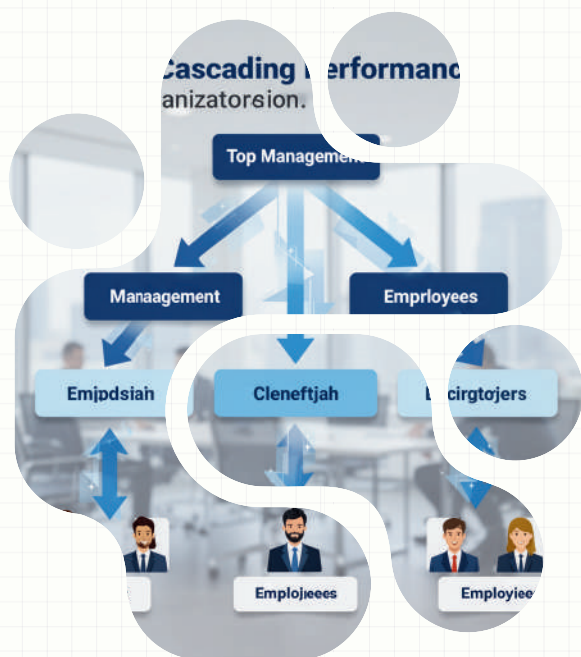
Penyelarasan kinerja dimulai dari Visi Kabupaten Konawe Utara, yaitu "Konawe Utara Sebagai Rumah Bersama yang Semakin Maju dan Sejahtera", yang kemudian diturunkan ke dalam Misi kedua yaitu "Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Produktif".



Pada level strategis, misi tersebut dijabarkan menjadi Tujuan daerah untuk "Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing" dengan indikator utama berupa Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini kemudian menjadi acuan bagi Sasaran daerah untuk "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat".

Secara operasional di tingkat perangkat daerah, Dinas Kesehatan mengadopsi sasaran tersebut menjadi Tujuan Perangkat Daerah (PD) dengan indikator spesifik berupa Usia Harapan Hidup (UHH) dan Prevalensi Stunting.

Selanjutnya, Tujuan PD ini dikerjakan melalui dua Sasaran Perangkat Daerah utama, yaitu:



1. Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dengan indikator Capaian SPM Bidang Kesehatan.
2. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan indikator Cakupan Kepesertaan JKN serta Persentase RSUD dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna.



## 1.7 Sistematika Penulisan Laporan





# Bab II

## Perencanaan Kinerja

### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tahun 2025 menjadi momentum krusial bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara karena merupakan masa peralihan dari Renstra 2021-2026 menjadi Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029. Dokumen ini disusun sebagai pedoman untuk menentukan arah dan kualitas pelayanan kesehatan agar setiap kebijakan yang diambil tetap terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penyusunan Renstra ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral yang wajib selaras dengan kebijakan daerah. Hal ini merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.



Sebagai jembatan untuk mewujudkan visi daerah, yakni **“Konawe Utara sebagai Rumah Bersama yang Semakin Maju dan Sejahtera”**, Dinas Kesehatan mengambil peran strategis dalam mendukung misi pertama, yaitu **“Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Produktif”**. dan dirancang agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan sasaran strategis **“Ter-**



**wujudnya Kesehatan untuk Semua**”, serta mendukung target Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan **“Masyarakat yang Sehat & Produktif untuk Indonesia Emas 2045”**. Dengan demikian, program kesehatan di Kabupaten Konawe Utara bukan sekadar aksi lokal, melainkan bagian dari upaya kolektif nasional. Sebagai bentuk pembangunan yang berkelanjutan, perumusan rencana masa depan ini tetap berpijak pada evaluasi dan kesuksesan target-target yang telah dicapai pada periode perencanaan sebelumnya.

### 2.1.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada Serentak Tahun 2024). Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi pembangunan jangka menengah yang akan diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 adalah (Bapperida Kabupaten Konawe Utara, 2025):



Sumber: (Bapperida Kabupaten Konawe Utara, 2025).



Visi RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 terdiri dari 3 (tiga) frase yaitu (Bapperida Kabupaten Konawe Utara, 2025):

#### a. Rumah Bersama

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Namun selain itu, rumah memiliki makna dan filosofi tersendiri. Rumah adalah tempat semua anggota keluarga berkumpul, tinggal dalam satu atap yang sama, berbagai kehangatan, keceriaan, kenyamanan, bahkan kesedihan bersama. Rumah bukan hanya sebagai tempat yang paling aman tetapi juga yang paling nyaman bagi semua penghuninya.

Maka wilayah Kabupaten Konawe Utara dengan kekayaan sumber daya alamnya serta keragaman masyarakatnya adalah tempat kembali yang paling kita rindukan kemanapun kita berada. Oleh karena itu, daerah Kabupaten Konawe utara harus diwujudkan menjadi daerah yang nyaman bagi seluruh masyarakat di dalamnya, baik dari aspek kenyamanan fisik, kenyamanan spiritual, kenyamanan lingkungan dan kenyamanan sosiokultural.

#### b. Maju

Kata Maju, mengandung arti mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdayasaing, sehingga masyarakat Kabupaten Konawe Utara dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupi segala kebutuhan kehidupan masyarakatnya.

#### c. Sejahtera

Masyarakat Kabupaten Konawe Utara Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kemiskinan, kebodohan, kesakitan,



kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang maju dan sejahtera.

### 2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025–2029 dilakukan dengan memperhatikan permasalahan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025–2029. Berdasarkan visi di atas, maka dirumuskan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 sebagai berikut:



Sumber: (Bapperida Kabupaten Konawe Utara, 2025)





### 2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan jangka menengah Dinkes Kabupaten Konawe Utara merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui Tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara yang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Menjadikan sasaran dari RPJMD sebagai tujuan Dinas Kesehatan hal ini agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 yang terkait dengan bidang kesehatan adalah Tujuan **“Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”**

dengan sasaran **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”**. Adapun tujuan jangka menengah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 yang merupakan Intermediate Outcome (atau hasil menengah) adalah **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”**

Sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis Pembangunan Daerah. Untuk mencapai tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 ditetapkan sasaran sebagai langkah-langkah atau pencapaian spesifik yang lebih terukur untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun sasaran rencana strategis Dinas Kesehatan yaitu: **“Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat”** dan **“Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.”**



**Tabel 2.1** Tujuan, Sasaran Strategis Indikator dan Target Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 (Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	T1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		T1.1 Usia Harapan Hidup (UHH)	70.50	71.09	71.21	71.47	71.73	71.95	
			T1.2 Prevalensi Stunting (%)	5	4.80	4.52	4.27	3.91	3.67	
1.1		S1.1 Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat	S1.1 Capaian SPM Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100	IKU
1.2		S1.2 Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	S1.2.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	94	99.93	100	100	100	100	IKU
			S1.2.2 Persentase Peningkatan RSUD dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	34.78	34.78	34.78	43.47	100	100	IKU

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, 2026.

### 2.1.4 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Adapun program dan kegiatan indikatif tersebut adalah sebagai berikut:





**Tabel 2.2** Sasaran Strategis, Strategi, Program dan Kegiatan Tahun 2025

Sasaran (1)	Strategi (2)	Program (3)	Kegiatan (4)	
Meningkatnya Akses dan Pemenuhan Upaya Kesehatan serta Gizi Masyarakat	Strategi 1.1	Efisiensi dan Peningkatan Alokasi Anggaran Kesehatan Berbasis Data dan Prioritas Program.	Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Strategi 1.4	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang berkualitas serta pengembangan pelayanan kesehatan bergerak bagi daerah sulit akses.		
	Strategi 1.5	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Alat Kesehatan Berbasis Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.		
	Strategi 1.6	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Secara Rutin.		
	Strategi 1.7	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Perbekalan Kesehatan (Obat, Vaksin, BMHP) Berbasis Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.		
	Strategi 1.8	Peningkatan Pelayanan dan Mutu SPM Bidang Kesehatan.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Strategi 1.9	Penurunan Kematian Ibu dan Anak.		
	Strategi 1.10	Pencegahan dan Penurunan Stunting.		
	Strategi 1.11	Penguatan JKN dan Pendanaan Kesehatan.		
	Strategi 1.12	Peningkatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis.		
	Strategi 1.13	Penuntasan TBC dan Pengendalian Penyakit Menular Lainnya.		
	Strategi 1.14	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Peningkatan Upaya Kesehatan Jiwa.		
	Strategi 1.16	Penguatan Surveilans, Pengendalian KLB/Wabah, dan Penanganan Bencana.		



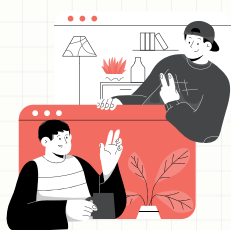
Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Strategi 1.17	Peningkatan sistem informasi kesehatan yang akurat dan terpadu dengan pemanfaatan serta integrasi teknologi digital kesehatan.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
	Strategi 1.2	Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan yang sudah ada sesuai standar 9 Tenaga Kesehatan;	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
	Strategi 1.3	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Strategi 1.18	Pemenuhan dan Penguatan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan serta Sediaan Farmasi.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (UMOT) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
			Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Strategi 1.15	Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif dengan Mendorong Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) serta Penyehatan Lingkungan.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Strategi 1.19	Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Kesehatan.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



## 2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:



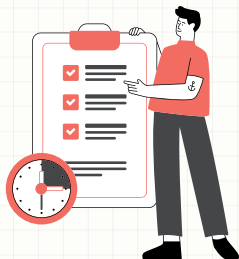
Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;



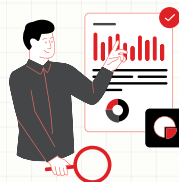
Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;



Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ke majuan kinerja penerima amanah;



Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuandan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;



Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :





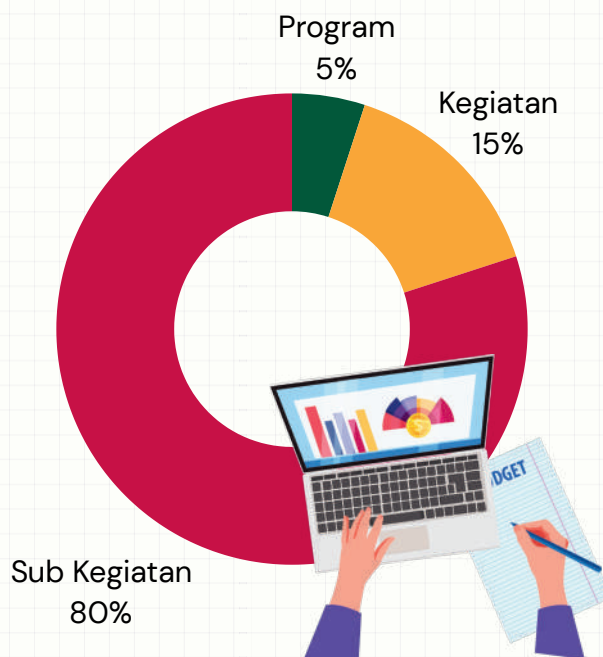
**Tabel 2.3** Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	S1.1 Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat	S1.1 Capaian SPM Bidang Kesehatan	100	
2.	S1.2 Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	S1.2. 1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	94	
		S1.2.2 Persentase Peningkatan RSUD dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	34.78	

## 2.3 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Dinas Kesehatan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis **“Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat”** dan **“Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan”** sebanyak **Rp. 67.367.786.187**, 4 Program, 12 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis





**Tabel 2.4** Alokasi Anggaran Tahun 2025

Nomor Akun	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.278.656.634,13
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.314.900,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.421.156.850,80
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	683.867.700
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.002.700
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.188.500.081,33
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.201.428.500
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.704.000
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	65.087.435.742,44
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	36.272.825.618,44
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.805.610.124
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	9.000.000
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.428.748.470
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	18.000.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	477.661.700
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	933.086.770
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	114.390.000
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	9.000.000
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	9.000.000
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	96.390.000
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	737.211.976,50
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	441.641.800
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	243.547.051,50
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.023.125
<b>TOTAL</b>		<b>108.646.442.823</b>



## Bab III

# Akuntabilitas Kinerja

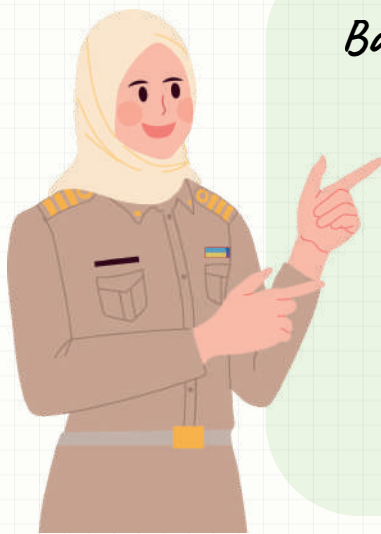
Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara merupakan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara adalah amanat dari para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan kemu-

dian dituangkan dalam laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Pengukuran kinerja dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada awal tahun anggaran dengan realisasi kinerja yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran. Teknik pengukuran kinerja terhadap indikator dan target Perjanjian Kinerja dilakukan dengan melakukan pengumpulan data primer secara kuantitatif terkait penyelenggaraan kegiatan administrasi dan pelaksanaan tugas teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara.



Pada BAB ini akan dijabarkan secara terperinci terkait hasil pengukuran kinerja, evaluasi serta analisis kemudian akan digambarkan pula keberhasilan, kegagalan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.



*Bab ini berisi:*

- 1. Capaian Kinerja Organisasi*
- 2. Realisasi Anggaran*
- 3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*
- 4. Inovasi*
- 5. Kolaborasi Lintas Sektor*
- 6. Kilas Balik 2025*



### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil evaluasi dan pengukuran capaian kinerja selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:



**Tabel 3.1** Skala Nilai Peringkat Kinerja



Sumber: (Permendagri Nomor 87 Tahun 2017).

### 3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.2** Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	Indikator	Target	Realisasi	%	Interprestasi	Kode
1	Capaian SPM Bidang Kesehatan	100%	83.07%	83.07	Tinggi	
2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	94%	100.56%	106.97	Sangat Tinggi	
3	Persentase Peningkatan RSUD dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna	34.78%	34.78%	100	Sangat Tinggi	
Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja			96.68%	Sangat Tinggi		



Berdasarkan Tabel diatas, hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat positif. Diketahui bahwa terdapat 2 (dua) indikator yang pencapaian targetnya masuk kategori **"Sangat Tinggi"**, yaitu Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan realisasi 100,56% dan Persentase Peningkatan RSUD dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna

sebesar 34,78% (Capaian Target 100%). Sementara itu, terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang capaian targetnya dikategorikan **"Tinggi"** yaitu Capaian SPM Bidang Kesehatan dengan realisasi sebesar 83,07%. Adapun persentase rata-rata capaian kinerja dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan tersebut adalah **96,68%**, yang secara keseluruhan menunjukkan predikat kinerja **"Sangat Tinggi"**.

### 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024



**Tabel 3.3** Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

NO	Indikator	2024			2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Capaian SPM Bidang Kesehatan	-	75.57%	83.07	100%	83.07%	83.07
2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	-	99.5%	106.97	94%	100.56%	106.97
3	Persentase Peningkatan RSUD dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna	34.78%	34.78%	100	34.78%	34.78%	100



Berdasarkan Tabel 3.3, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara antara tahun 2024 dan 2025. Perlu dicatat bahwa indikator Capaian SPM Bidang Kesehatan dan Cakupan Kepesertaan JKN baru muncul sebagai target pada Renstra Dinas Kesehatan, RPJMN dan Renstra Kemenkes 2025–2029, sehingga tidak terdapat perbandingan target di tahun 2024.

Meskipun demikian, terjadi peningkatan kinerja pada indikator Capaian SPM Bidang Kesehatan dari 75,57% menjadi 83,07% di tahun 2025, serta pada Cakupan Kepesertaan JKN dari 99,5% menjadi 100,56%. Sementara itu, indikator Persentase RSUD dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna menunjukkan stabilitas kinerja dengan mempertahankan capaian sebesar 34,78% yang konsisten memenuhi target tahunan sebesar 100%.

### 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

**Tabel 3.4** Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
S1.1 Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Capaian SPM Bidang Kesehatan	83.07%	100%	83.07%
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	100.56%	100%	100.56%
S1.2 Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Peningkatan RSUD dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna	34.78%	100%	34.78%

Sumber: RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029



Pada Tabel 3.4, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2025 dengan target akhir RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara tahun 2029. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tingkat kemajuannya telah melampaui target akhir periode 2029 meskipun baru berada pada tahun pertama pelaksanaan, yaitu indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dengan tingkat kemajuan sebesar 100,56%. Hal ini menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi dalam percepatan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Konawe Utara.

Selanjutnya, terdapat 2 (dua) indikator yang progresnya masih terus berjalan menuju target akhir RENSTRA, yaitu Capaian SPM Bidang Kesehatan dengan tingkat kemajuan sebesar 83,07% dan Persentase Peningkatan RSUD dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna dengan tingkat kemajuan sebesar 34,78%. Kedua indikator ini merupakan instrumen yang perlu diintervensi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pada akhir tahun periode RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara tahun 2029, seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

### 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Jika dilihat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara yang selaras dengan target standar nasional.





**Tabel 3.5** Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Stadar Nasional	Ketercapaian
S1.2 Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Capaian SPM Bidang Kesehatan	83.07%	90%	Tidak Tercapai
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	100.56%	98.6%	Tercapai
S1.1 Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Persentase Peningkatan RSUD dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna	34.78%	33%	Tercapai

Sumber: (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029) & Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan perbandingan tersebut, diketahui bahwa terdapat 2 (dua) indikator yang telah berhasil mencapai dan melampaui standar nasional yang ditetapkan, yaitu indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dengan realisasi 100,56% (Standar Nasional 98,6%) dan Persentase Peningkatan RSUD dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna dengan realisasi 34,78% (Standar Nasional 33%).

Sementara itu, terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai standar nasional yaitu Capaian SPM Bidang Kesehatan dengan realisasi sebesar 83,07% dari standar nasional yang ditetapkan sebesar 90%. Hal ini menjadi prioritas intervensi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara agar selaras dengan target capaian nasional pada periode 2025-2029.



### 3.6 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut kemudian dilakukan analisis pada setiap sasaran strategis untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor pendukung serta faktor penghambat terhadap kinerja yang diharapkan.

Serta akan dijabarkan pula formulasi dan cara perhitungan dalam memperoleh realisasi indikator kinerja, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

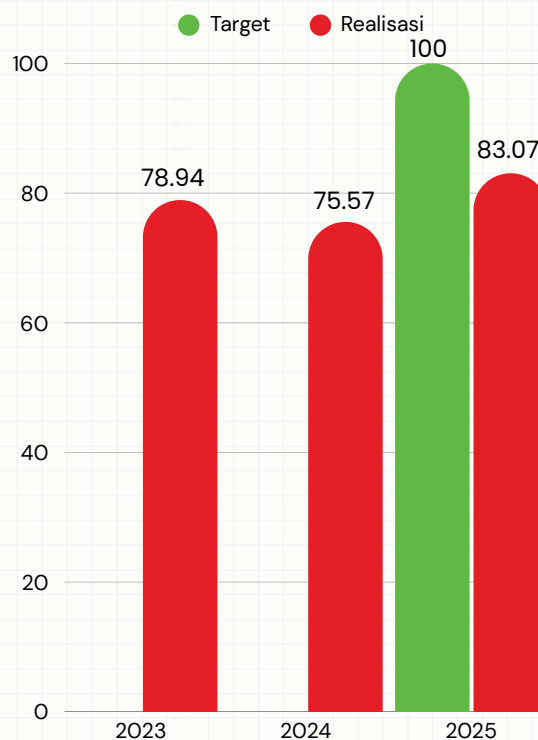
#### 1. Capaian SPM Bidang Kesehatan

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat.

#### Formulasi

$$\begin{aligned} & (\text{Persentase pencapaian mutu layanan} \\ & \text{dasar} \times \text{Bobot Mutu}) \\ & + \\ & (\text{Persentase Pencapaian Penerima} \\ & \text{Layanan} \times \text{Bobot Penerima Layanan Dasar}) \end{aligned}$$

Grafik 3.1 Perbandingan Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023-2025



Sumber: Admin SPM Dinas Kesehatan



Berdasarkan Grafik 3.1, dapat dilihat tren capaian SPM Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara pada periode 2023–2025. Perlu dicatat bahwa pada tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat penetapan target dikarenakan indikator ini baru muncul dan ditetapkan secara resmi pada RPJMN, Renstra Kemenkes, serta Renstra Dinas Kesehatan 2025–2029.

Meskipun demikian, jika meninjau realisasi kerjanya, terjadi fluktuasi yang berujung pada peningkatan di tahun terakhir. Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 78,94% dengan kategori **Tuntas Pratama**, kemudian pada tahun 2024 realisasi tercatat sebesar 75,57% yang tetap berada pada kategori **Tuntas Pratama**.

Memasuki tahun 2025, terjadi peningkatan kinerja yang signifikan dengan realisasi mencapai 83,07%. Capaian ini tidak hanya menunjukkan tren positif secara angka, tetapi juga berhasil meningkatkan status capaian kinerja Dinas Kesehatan menjadi kategori **Tuntas Madya**. Hal ini membuktikan adanya komitmen dalam pemenuhan standar pelayanan minimal yang selaras dengan target pembangunan kesehatan nasional terbaru.



## Penyebab Kegagalan

1. Masalah Data Sasaran (Pusat seringkali menetapkan target berdasarkan data proyeksi (Pusat Data dan Informasi), sementara di lapangan jumlah penduduk sasaran jauh berbeda) Jika data sasaran (pembagi) terlalu besar dari kenyataan, maka capaian persentase otomatis akan terlihat rendah meskipun petugas sudah bekerja maksimal.
2. Adanya Efisiensi dan Pemangkasan Anggaran (*Refocusing*).
3. Ada miskonsepsi bahwa SPM adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat sepenuhnya melalui dana BOK (Dak Non-Fisik). Dana BOK pusat memiliki juknis yang kaku dan terbatas. Sementara itu, komitmen APBD (Pemerintah Daerah) untuk sharing anggaran seringkali masih rendah. Anggaran seringkali hanya cukup untuk pelayanan di dalam gedung, sementara SPM menuntut petugas untuk melakukan pelacakan (kunjungan rumah) yang membutuhkan biaya operasional besar.
4. Untuk mencapai target 100% (termasuk penduduk di pelosok), dibutuhkan sarana transportasi yang mumpuni. Seperti di Konawe Utara, Motor dinas atau kendaraan puskesmas keliling belum mencukupi, membuat penduduk di wilayah sulit tidak terdata dan tidak terlayani, sehingga angka 100% mustahil tercapai.
5. Pemerintah saat ini mewajibkan input data ke aplikasi (seperti ASIK atau Satu Sehat). Terjadi beban ganda petugas sibuk melayani pasien, tapi juga harus menginput ribuan data secara digital.



Kurangnya perangkat (laptop) dan jaringan internet di Konawe Utara membuat data yang sudah dikerjakan di lapangan tidak terkirim ke server pusat, sehingga capaian di dashboard nasional terlihat rendah (padahal sudah dikerjakan).



## Penghambat

1. Terdapat penurunan dukungan anggaran operasional untuk intervensi spesifik di tingkat Kabupaten maupun Puskesmas. Pendanaan BOK yang sangat terbatas dan sering kali berbasis triwulanan tidak sebanding dengan beban target sasaran yang mencapai puluhan ribu orang.
2. Jumlah tenaga pelaksana program di Puskesmas masih sangat kurang secara kuantitas. Beban kerja untuk memenuhi 12 indikator SPM yang sangat kompleks menuntut jumlah nakes yang mencukupi, namun realitanya satu petugas sering kali memegang beberapa program sekaligus.
3. Kendala kendaraan operasional (motor dinas) menghambat petugas untuk menjangkau masyarakat di wilayah pelosok.
4. Minimnya perangkat laptop dan jaringan internet menghambat sinkronisasi pencatatan dan pelaporan data real-time.
5. Kurangnya alat kesehatan standar dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di tingkat dasar menyebabkan layanan yang diberikan sering kali belum memenuhi kriteria "Sesuai Standar".

## Solusi/Alternatif

1. Melakukan penambahan dukungan anggaran melalui APBD untuk menutupi gap pendanaan BOK, guna memastikan seluruh kegiatan pokok dan pengembangan 12 indikator SPM dapat berjalan maksimal.
2. Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alkes Pelayanan: Memprioritaskan pengadaan motor dinas, laptop, serta pemenuhan Alkes dan BMHP secara lengkap di seluruh Puskesmas.
3. Melakukan pemetaan dan penambahan tenaga kesehatan yang fokus pada pelayanan luar gedung (skrining dan kunjungan rumah) agar beban kerja pelaksana program lebih proporsional. Mengingat banyak penambahan P3K baik penuh waktu dan paruh waktu di akhir tahun 2025.
4. Memperkuat integrasi lintas program agar pelayanan 12 indikator SPM dapat dilakukan secara satu pintu (efisiensi waktu dan sumber daya) tanpa mengurangi kualitas standar pelayanan.



## 2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

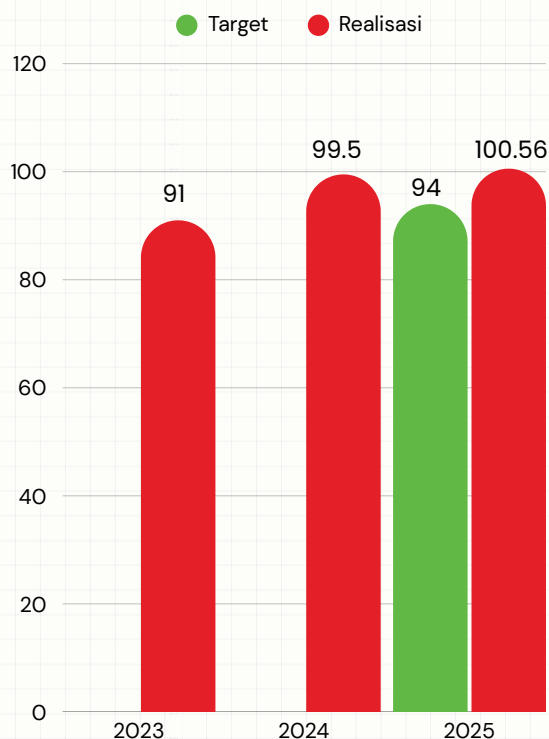
### Formulasi

$$\frac{\text{Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten Konawe Utara Pada Periode yang Sama}} \times 100\%$$



Pada Grafik 3.2, terlihat tren peningkatan signifikan pada Cakupan Kepesertaan JKN periode 2023–2025. Perlu dicatat bahwa pada tahun 2023 dan 2024 belum terdapat penetapan target formal, dikarenakan indikator ini baru resmi ditetapkan sebagai target kinerja dalam RPJMN, Renstra Kemenkes, dan Renstra Dinas Kesehatan periode 2025–2029. Meskipun demikian, realisasi kepesertaan menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif setiap tahunnya. Pada tahun 2023, cakupan mencapai 91% (70.523 jiwa) dengan PBI sebesar 70,2% (54.357 jiwa) dan Non-PBI sebesar 20,9% (16.166 jiwa).

Grafik 3.2 Perbandingan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023–2025



Sumber: Profil Kesehatan dan Pengelola JKN Dinas Kesehatan

Memasuki tahun 2024, angka ini meningkat menjadi 99,5% (82.993 jiwa), di mana kepesertaan PBI meningkat menjadi 72,1% (58.645 jiwa) dan Non-PBI mencapai 29,2% (24.348 jiwa). Puncaknya pada tahun 2025, Kabupaten Konawe Utara berhasil mencatatkan capaian sebesar 100,56% atau menjangkau 84.225 jiwa. Dengan capaian yang melampaui 100% ini, Kabupaten Konawe Utara telah resmi memperoleh predikat Universal Health Coverage (UHC) Kategori Utama.



Pencapaian ini membuktikan komitmen penuh pemerintah daerah dalam memberikan kepastian perlindungan kesehatan yang menyeluruh, berkualitas, dan tanpa hambatan biaya bagi seluruh penduduk di Kabupaten Konawe Utara.

### Penyebab Keberhasilan

1. Dukungan Strategis Kepala Daerah: Komitmen Bupati dalam prioritas anggaran iuran JKN bagi PBPU Pemda, memastikan seluruh masyarakat miskin terakomodasi tanpa kendala biaya.
2. Adanya penunjukan penanggung jawab JKN yang kompeten untuk mengawal kualitas layanan dan kepesertaan.
3. Rekonsiliasi Data Lintas Sektor secara Terintegrasi dan Rutin: koordinasi yang solid melalui rekonsiliasi data rutin antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, dan BPJS Kesehatan. Sinkronisasi data dilakukan secara berkala untuk melakukan pembersihan data (*cleansing data*), pendaftaran peserta baru, serta pengalihan kepesertaan yang tepat sasaran, sehingga data kepesertaan tetap akurat dan mutakhir.
4. Sistem pelayanan secara online mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran, perubahan data, maupun pengaduan terkait kepesertaan JKN. Digitalisasi ini memangkas birokrasi, mempercepat waktu tunggu, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
5. Pencapaian kategori Utama memberikan keunggulan berupa kepastian layanan *non-cut off* (kepesertaan langsung aktif saat didaftarkan). Hal ini menjadi daya tarik dan motivasi kuat bagi pemerintah daerah untuk terus mempertahankan performa kepesertaan di atas target nasional.

### SUCCESS

### Penghambat

Masalah Ketidakpadanan Data Kependudukan: Masih ditemukan data penduduk yang tidak padan antara database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sistem informasi BPJS Kesehatan. Masalah ini mencakup ketidaksesuaian NIK, perbedaan penulisan nama, hingga status kependudukan yang belum dimutakhirkan (pindah datang/meninggal). Ketidakpadanan ini menyebabkan proses pengaktifan kepesertaan tidak dapat dilakukan secara otomatis. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya segera mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan harus menunda aktivasinya untuk melakukan validasi data terlebih dahulu, yang memakan waktu.

### Solusi/Alternatif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus lebih proaktif dalam melakukan peremajaan dan pemadanan data kependudukan secara berkala. Hal ini bertujuan agar saat masyarakat membutuhkan aktivasi BPJS Kesehatan, data mereka sudah dalam status "Padan" dan siap digunakan tanpa kendala administratif.



### 3. Persentase Peningkatan RSUD dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna

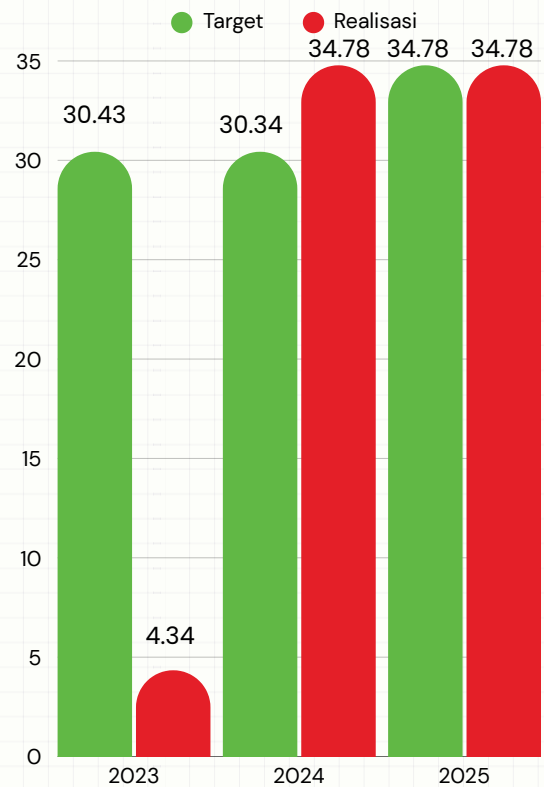
Persentase fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan RS) yang mendapatkan status akreditasi paripurna dan masih berlaku dalam kurun waktu 2025-2029. Status Paripurna menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan telah memenuhi semua standar pelayanan yang ditetapkan.

#### Formulasi

$$\frac{\text{Jumlah fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan RS) yang mendapatkan status akreditasi paripurna dan masih berlaku dalam kurun waktu 2025-2029}}{\text{Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Teregistrasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan Grafik 3.3, terlihat perkembangan signifikan pada kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Konawe Utara melalui pencapaian akreditasi paripurna. Pada tahun 2023, kualitas pelayanan tertinggi masih sangat terbatas, di mana belum ada Puskesmas yang meraih status paripurna dan baru tercatat 1 unit Rumah Sakit dari total 22 Puskesmas yang ada (realisasi 4,34%).

Grafik 3.3 Perbandingan Persentase Peningkatan RSUD dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna Tahun 2023-2025



Sumber: Profil Kesehatan 2024 dan Programer Akreditasi Fasyankes

Peningkatan terjadi pada tahun 2024 dan bertahan hingga tahun 2025, di mana realisasi akreditasi paripurna meningkat menjadi 34,78%. Pencapaian ini didorong oleh keberhasilan 7 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit dalam meraih predikat Paripurna. Adapun tujuh Puskesmas tersebut meliputi **Puskesmas Sawa, Lembo, Lasolo, Molawe, Tapungaya, Andowia, dan Wanggudu Raya.**



### Penyebab Keberhasilan

Mengoptimalkan fungsi pembinaan dari Dinas Kesehatan melalui tim Pembina Terpadu Puskesmas (TPCB) untuk melakukan perbaikan pasca penilaian akreditasi untuk persiapan akreditasi selanjutnya. Hal ini bertujuan agar standar operasional prosedur (SOP) tetap dipatuhi tanpa harus menunggu penilaian.



### Penghambat

Hambatan utama dalam meningkatkan persentase ini adalah masa berlaku sertifikat akreditasi pada sebagian besar fasilitas kesehatan yang masih aktif hingga tahun 2025, sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan penilaian ulang (re-akreditasi) di tahun berjalan.



### Solusi/Alternatif

Perlu disusun perencanaan anggaran yang komprehensif untuk tahun mendatang guna memfasilitasi RSUD atau Puskesmas yang masa akreditasinya akan habis, serta memberikan dukungan teknis bagi fasilitas kesehatan yang masih berada di level bawah agar dapat naik ke tingkat Paripurna pada penilaian berikutnya.

## 3.7 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program dan Indikator Program

Terwujudnya sasaran **“Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat”** dan **“Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan”**, dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan baik program utama maupun program pendukung selama tahun anggaran 2025. Program-program tersebut dilaksanakan oleh bidang yang ada di dinas kesehatan yaitu, Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan. Program yang telah diselenggarakan antara lain sebagai berikut :



**Program Utama**

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Dan Minuman;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

**Program Pendukung**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah



**Formulasi**

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

**Tabel 3.6** Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup (Rasio)	Rasio	5	4,5	100%
		Persentase Persalinan di Fasyankes (%)	Persen	80	99,92	100%
		Persentase ANC (Kunjungan Ibu Hamil) 6 Kali (%)	Persen	71	80,7	100%
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (%)	Persen	82	98,6	100%
		Prevalensi Gizi Kurang pada Balita (%)	Persen	4	4,77	80,75%
		Persentase Ibu Hamil Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD 180 Tablet) (%)	Persen	72	70	97,22%
		Persentase Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) (%)	Persen	36	36,55	100
		Persentase Lansia Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar (%)	Persen	96	98,18	100
		Insidensi HIV per 100.000 Penduduk (Rasio)	Rasio	0	74,12	0
		Jumlah Desa/Kelurahan dengan 5 pilar STBM (Desa/Kelurahan)	Desa/Kelurahan	2	142	100
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Persen	30	0,28	0,93



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) di RS Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Kesehatan (%)	Persen	60	73,65	100
		Persentase Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) di Puskesmas yang Memenuhi Standar Kesehatan (%)	Persen	44	44,53	100
		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat Esensial (%)	Persen	92	100	100
		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) (%)	Persen	100	100	100
1.1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
1.1.1.	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	2	2	100
1.1.2.	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	1	100
1.1.3.	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	2	2	100
1.1.4.	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	10	11	110
1.1.5.	Rehabilitas dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	1	1	100
1.1.6.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	22	22	100
1.1.7.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	7	350
1.1.8.	Pengelolaan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	2000	2000	100
1.1.9.	Pengembangan Pendekatan Pelayanan di DPTK (Pelayanan kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	Pelayanan			
1.1.9.	Distribusi Alat Kesehatan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	22	22	100
1.2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	81,24	81%





No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	78,69	79%	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	86,57	87%	
		Cakupan layanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	96,13	96%	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan kesehatan sesuai standar	Persen	100	97,49	97%	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	71,59	72%	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	98,19	98%	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	58,45	58%	
		Persentase penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	162,14	162%	
		Persentase Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	62,24	62%	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	125,93	126%	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	80,19	80%	
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 kelahiran hidup	0	152,2	0	
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	97	99	100	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	100	99	99	
1.2.1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah bu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1679	1364	81,24	
1.2.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1675	1318	78,69	
1.2.3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1519	1315	86,57	



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2.4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6252	6010	96,13
1.2.5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4739	4620	97,49
1.2.6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	47931	34312	71,59
1.2.7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4467	4386	98,19
1.2.8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15507	9064	58,45
1.2.9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	795	1289	162,14
1.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	98	61	62,24
1.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1296	1632	125,93
1.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1686	1352	80,19
1.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	1	100
1.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1	1	100
1.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	100
1.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	100
1.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	100
1.2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	100
1.2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	1	100
1.2.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	100





No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	80	61	76
1.2.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Orang	2000	2000	100
1.2.23	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Orang			#DIV/0!
1.2.24	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	100
1.2.25	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	100
1.2.26	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	14000	120	1
1.2.27	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Orang			#DIV/0!
1.2.28	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	1	100
1.2.29	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	100
1.2.30	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	10	22	220
1.2.31	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dokumen	1	1	100
1.2.32	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	1	100
1.2.33	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	22	22	100
1.2.34	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	124	6	5
1.2.35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		Dokumen	22	22	100
1.2.36	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100





No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2.37	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	100
1.2.38	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Dokumen	1	1	100
1.2.39	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	100
1.2.40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	1	1	100
1.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	Persen	100	100	100
1.3.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	100
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter Spesialis per 1.000 penduduk	Rasio	0,10	16,62	100
2.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki SIP	%	100	100	100
2.1.1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	1	100
2.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	1	100
2.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Rasio	12,98	17,38	100
2.2.1	Perencanaan dan Distribusi Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	100
2.2.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	300	300	100
2.2.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	100
2.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan/bimbingan teknis/workshop pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan yang diselenggarakan Tingkat Kabupaten Konawe Utara	Pelatihan	5	5	100





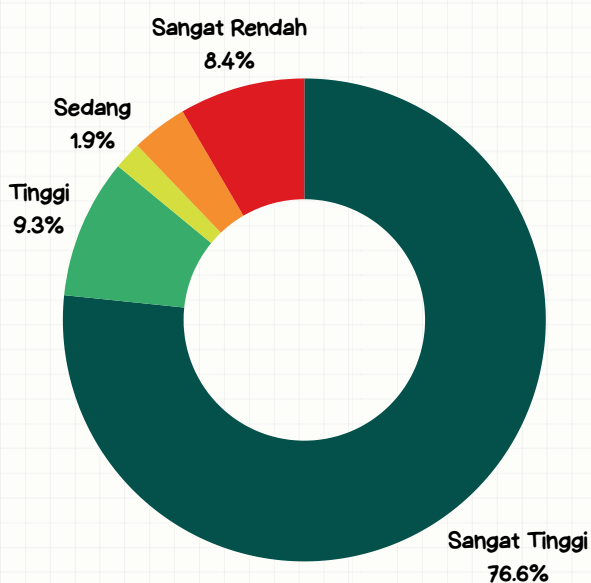
No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.3.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	250	250	100
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan yang Memenuhi Syarat	Persen	59,5	4,52	7,59%
		Cakupan Apotek dan Toko Obat yang Memiliki Izin	Persen	100	100	100
3.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek dan Toko Obat yang Memiliki Izin	Unit	22	22	100
3.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1	1	100
3.2	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persen	0	0	0
3.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0
3.3	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi	Persen	0	1	100
3.3.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	1	100
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persen	75	96,49	100
4.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Konawe Utara	Persen	100	100	100





No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	1	100
4.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pesen	100	100	100
4.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	1	100
4.2.2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Keluarga	14000	60	0
4.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM Aktif	Pesen	35	100	100
4.3.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	1	100

**Grafik 3.4 Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan**



Berdasarkan tabel 3.6 diatas, hasil penilaian kinerja indikator program Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara yang tercantum pada tabel diatas dapat dilihat bahwa predikat pencapaian indikator program strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara dari 107 indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang dinilai, 82 indikator kinerja berpredikat Sangat Tinggi, 10 indikator kinerja berpredikat Tinggi, 2 indikator kinerja berpredikat Sedang, 4 indikator kinerja berpredikat rendah dan 9 indikator kinerja dengan predikat Kurang Berhasil. Dan 2 yang tidak Terealisasi.

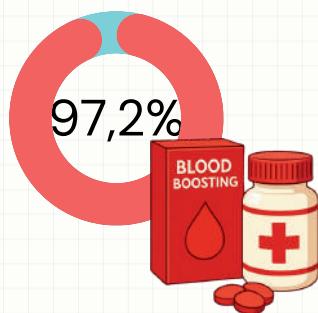


## 1. 82 indikator kinerja berpredikat Sangat Tinggi



Capaian kinerja indikator Kunjungan Ibu Hamil K6 sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 80,7% dari target 71%. Meskipun realisasi meningkat berkat tingginya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan, dukungan SDM tenaga kesehatan, ketersediaan fasilitas USG, serta peran aktif keluarga, namun secara jumlah masih terdapat selisih di mana hanya 1.117 ibu hamil yang terlayani sesuai standar dari total 1.383 ibu hamil yang ada.

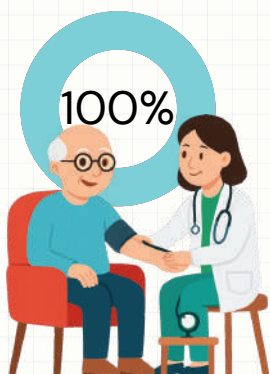
Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap mencapai 100%, dengan realisasi sebesar 98,6%, melampaui target 82%. Secara angka, realisasi mencapai 1.296 bayi dari total 1.314 *surviving infant*, namun belum menyentuh angka proyeksi 1.546 orang dikarenakan target Pusdatin yang lebih tinggi dari sasaran riil, tingginya mobilitas penduduk, serta adanya sebagian kecil orang tua yang masih menolak imunisasi.



Indikator konsumsi TTD 180 tablet mencapai kinerja 97,22% dengan realisasi 70% dari target 72%. Keberhasilan ini didorong oleh integrasi pemeriksaan ANC yang terstandar, distribusi TTD gratis melalui program pemerintah seperti PKH, serta pendampingan aktif dan kunjungan rumah oleh kader kesehatan yang meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen gizi.

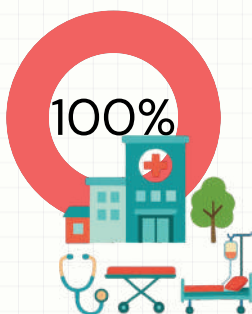
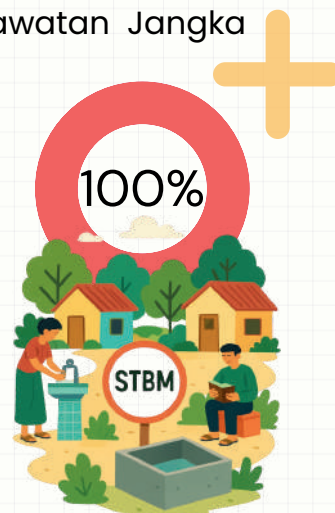
Capaian Pemeriksaan Kesehatan Gratis mencapai 100% dengan realisasi 36,55% dari target 36%, yang mencakup 30.506 jiwa dari total populasi. Hasil ini didorong oleh keaktifan tenaga kesehatan di lapangan, meskipun masih menghadapi kendala berupa kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri secara rutin, gangguan teknis pada aplikasi (*maintenance*), serta keterbatasan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).





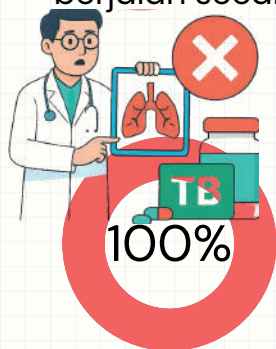
Indikator skrining kesehatan lansia mencapai kinerja 100% dengan realisasi 98,18%, di mana 4.386 lansia dari total 4.467 orang telah mendapatkan pelayanan sesuai standar. Hal ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran lansia untuk melakukan pemeriksaan di Posyandu dan Puskesmas, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan tenaga kesehatan yang terlatih dalam Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi lansia.

Capaian Desa/Kelurahan STBM mencapai 100% dengan realisasi sebanyak 142 desa/kelurahan, jauh melampaui target awal sebanyak 2 desa. Seluruh wilayah tersebut telah terverifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS), meskipun di beberapa titik masih ditemukan praktik BABS akibat kendala ekonomi rumah tangga, kondisi geografis yang sulit, serta keterbatasan lahan untuk pembangunan jamban sehat.

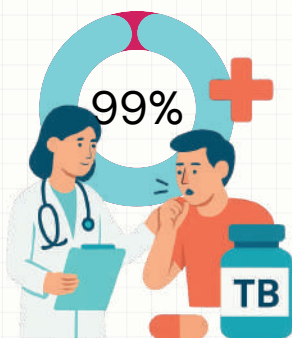


Indikator kelengkapan data SPA di Puskesmas mencatatkan capaian 100% dengan realisasi sebesar 44,53%, sedikit melampaui target yang ditetapkan sebesar 44%. Pemenuhan data ini tetap diupayakan secara maksimal guna memastikan seluruh fasilitas kesehatan memiliki inventarisasi sarana dan prasarana yang terpantau sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.

Capaian kinerja untuk ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin Imunisasi Rutin Lengkap (IRL) di Puskesmas mencapai target sempurna 100%. Seluruh 22 unit Puskesmas di wilayah Kabupaten Konawe Utara dipastikan memiliki ketersediaan obat esensial dan vaksin yang memadai, sehingga pelayanan kesehatan dasar dan imunisasi bagi masyarakat dapat berjalan secara optimal tanpa hambatan logistik.



Capaian penemuan kasus TB mencapai 100% dengan realisasi 99% dari target 97%, di mana sebanyak 214 kasus telah ditemukan dan diobati. Kendala utama yang dihadapi adalah masih adanya pasien yang tidak melakukan kunjungan ulang sesuai jadwal akibat kurangnya kesadaran serta belum optimalnya inovasi pengawasan minum obat dari pihak keluarga penderita.



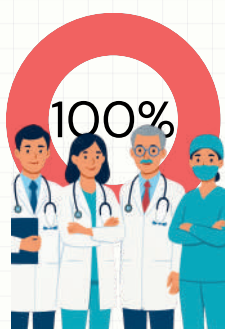
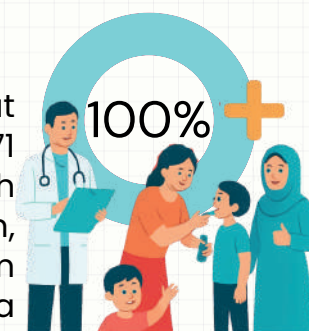
Angka keberhasilan pengobatan TB mencapai kinerja 99% dengan realisasi 99% dari target 100%. Dari total 216 kasus, sebanyak 214 kasus berhasil diobati dan dilaporkan. Belum maksimalnya angka ini dipicu oleh ketidakpatuhan pasien dalam pengambilan obat serta kurangnya pengawasan ketat dari keluarga untuk memastikan penderita meminum obat secara teratur hingga tuntas.

Indikator Cakupan Apotek dan Toko Obat yang Memiliki Izin mencapai 100%, dengan realisasi seluruh apotek dan toko obat di wilayah Kabupaten Konawe Utara telah memiliki izin resmi. Tercatat sebanyak 22 sarana yang beroperasi secara legal, terdiri dari 20 unit Apotek dan 2 unit Toko Obat, yang memastikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat telah memenuhi standar regulasi.



Capaian Posyandu Siklus Hidup Aktif tercatat sebesar 100% dengan realisasi 96,49%, di mana 165 dari 171 Posyandu dinyatakan aktif. Tantangan yang dihadapi meliputi keterlambatan penginputan laporan pada aplikasi Komdat, pembinaan kader yang belum optimal, kurangnya dukungan pemerintah desa, serta keterbatasan pengetahuan kader mengenai format baru posyandu siklus hidup.

Indikator Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Aktif mencapai 100% dari target 35%, dengan total 171 unit UKBM yang beroperasi. Keberhasilan ini didukung penuh oleh kebijakan pemerintah, peran aktif para kader di lapangan, partisipasi masyarakat yang tinggi, serta integrasi program UKBM dengan berbagai program kesehatan lainnya secara sinergis.

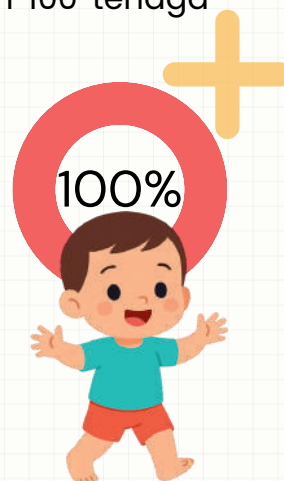


Capaian rasio dokter spesialis mencapai 100% dengan realisasi rasio 16,62, jauh melampaui target 0,10. Saat ini terdapat 12 dokter spesialis untuk melayani populasi sebanyak 84.225 jiwa, di mana pemenuhan tenaga medis spesialis ini sangat terbantu melalui program Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang ditempatkan di wilayah Konawe Utara.



Capaian rasio tenaga kesehatan dan medis mencapai 100% dengan realisasi rasio 17,38, melampaui target 12,98. Penguatan sumber daya manusia ini didukung oleh perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta pemenuhan tenaga medis melalui jalur Nusantara Sehat, penugasan khusus, dan PPDS, sehingga tercatat sebanyak 1.364 tenaga kesehatan dan 100 tenaga medis yang siap melayani masyarakat.

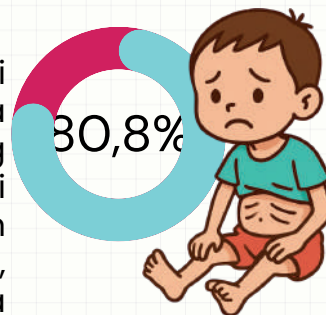
Capaian kinerja untuk indikator Angka Kematian Balita sebesar 100%, dengan realisasi rasio sebesar 4,5 per 1.000 kelahiran hidup dari target yang ditetapkan sebesar 5 per 1.000 kelahiran hidup. Terdapat sebanyak 6 balita yang meninggal dunia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan hasil diagnosis terhadap seluruh kasus kematian balita yang terjadi, diketahui bahwa faktor utama penyebab kematian tersebut adalah kondisi asfiksia.

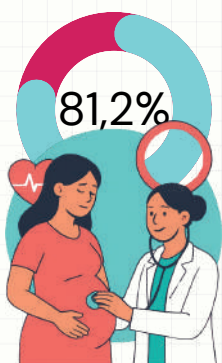


Capaian kinerja untuk indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sebesar 100%, di mana realisasi di lapangan mencapai 99,92%. Dari total 1.319 ibu bersalin pada tahun 2025, sebanyak 1.318 orang telah mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan. Peningkatan angka persalinan ini didorong oleh tingginya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan, dukungan kompetensi sumber daya manusia tenaga kesehatan yang memadai, serta peran aktif keluarga dalam mendukung proses persalinan di fasyankes.

## 2. 10 indikator kinerja berpredikat Tinggi

Indikator Prevalensi Gizi Kurang pada Balita mencapai 80,75% dengan realisasi 4,77% dari target 4%, di mana ditemukan 290 balita gizi kurang dari 6.075 balita yang ditimbang pada tahun 2025. Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh kondisi wasting akut akibat penurunan berat badan yang cepat, tingginya angka penyakit infeksi, serta kurangnya asupan makanan secara drastis pada balita dalam periode tertentu.

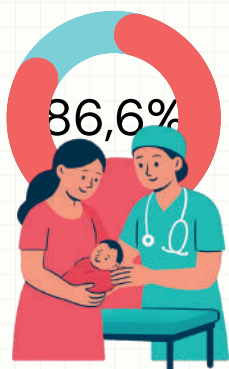
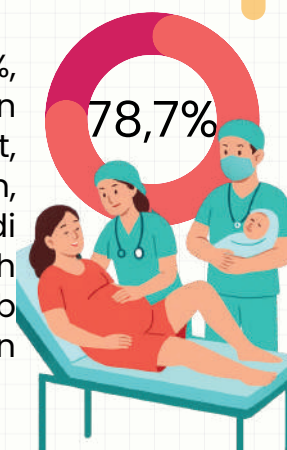




Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil mencapai 81,24%, dengan realisasi 1.364 orang dari target 1.679. Meski kualitas layanan Antenatal Care (ANC) meningkat, target belum terpenuhi maksimal karena masih diperlukannya kolaborasi intensif antara tenaga kesehatan, keluarga, dan komunitas guna memastikan akses pelayanan rutin bagi setiap ibu hamil. Capaian ini sekaligus mencerminkan kinerja indikator Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan.



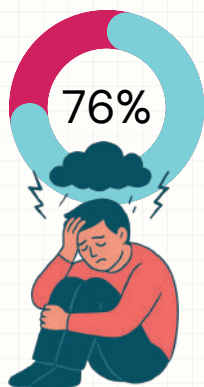
Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin mencapai 78,69%, dengan realisasi 1.318 orang dari target 1.675. Peningkatan persalinan di fasyankes didukung oleh kesadaran masyarakat, kesiapan tenaga kesehatan, dan dukungan keluarga. Namun, target belum terpenuhi maksimal akibat adanya gap data, di mana sasaran Datin tercatat lebih tinggi daripada jumlah sasaran riil di lapangan. Capaian ini sekaligus menjawab indikator Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan.



Indikator Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir mencapai 86,57%, dengan realisasi 1.315 bayi dari target 1.519. Meski telah melampaui angka 80%, target belum maksimal sehingga diperlukan penguatan akses layanan neonatal dan pemantauan rutin untuk memastikan setiap bayi baru lahir mendapatkan standar kesehatan lengkap. Capaian ini sekaligus mencerminkan kinerja indikator Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan.

Indikator Pelayanan Kesehatan Orang Terduga HIV mencapai 80,19%, dengan realisasi 1.352 orang dari target 1.686. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang nihil kasus, pada 2025 tercatat 1 kasus pengobatan aktif. Belum maksimalnya target disebabkan banyaknya warga ber-KTP Konawe Utara memilih berobat ke luar wilayah demi privasi dan menghindari stigma, meskipun layanan PDP sudah tersedia secara lokal. Capaian ini sekaligus menjawab indikator Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini.

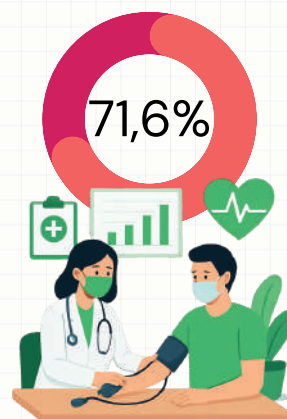




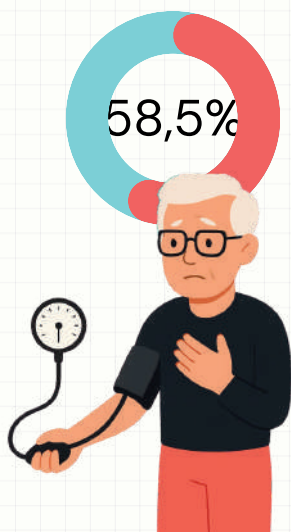
Indikator Pelayanan Kesehatan ODMK mencapai 76%, dengan realisasi 61 orang dari target 80. Meski terdapat peningkatan berkat dukungan pemerintah dan integrasi skrining kesehatan jiwa di Posyandu ILP, target 100% belum tercapai karena rendahnya kesadaran keluarga akibat stigma sosial, kendala administrasi (KK/BPJS), serta seringnya pergantian operator aplikasi Simkeswa di Puskesmas. Capaian ini sekaligus mencerminkan kinerja pelayanan bagi penderita gangguan jiwa secara menyeluruh.

### 3. 2 indikator kinerja berpredikat Sedang

Indikator Pelayanan Kesehatan Usia Produktif mencapai 71,59%, dengan realisasi 34.312 orang dari target 47.931. Meski capaian meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, target belum terpenuhi akibat ketimpangan anggaran yang tidak sebanding dengan besarnya jumlah sasaran, kurangnya tenaga pelaksana di Puskesmas, serta keterbatasan sarana penunjang seperti kendaraan operasional, perangkat digital, dan BMHP. Capaian ini sekaligus menjawab indikator Persentase Orang Usia 15–59 Tahun mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar.



### 4 4 indikator kinerja berpredikat rendah



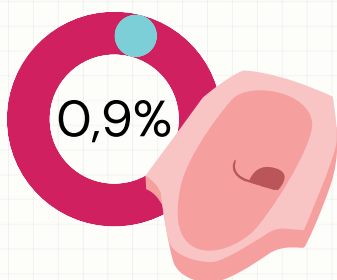
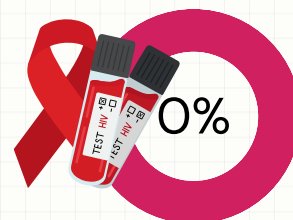
Capaian kinerja Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sebesar 58,45%. Dari target sebanyak 15.507 orang, realisasi sebanyak 9.064 orang. Meskipun secara angka persentase layanan mengalami peningkatan dari 54% menjadi 59%, namun capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan. Penyebab tidak mencapai target yaitu jumlah Sasaran Sangat Tinggi, Perhitungan sasaran menggunakan data SKI 2023 yang menetapkan prevalensi hipertensi di Sulawesi Tenggara sebesar 29,3%. Hal ini diasumsikan hampir 30% penduduk usia 15 tahun ke atas menderita hipertensi. Kenyataan hasil skrining di lapangan menunjukkan angka penderita tidak setinggi prevalensi yang diproyeksikan. Indikator ini merupakan turunan dari indikator Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar jadi sekaligus menjawab indikator tersebut.



Capaian Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Sesuai Standar sebesar 62,24%. Dari target sasaran sebanyak 98 orang, realisasi pelayanan menjangkau 61 orang. Angka ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan jiwa belum dapat mencakup seluruh sasaran yang telah ditetapkan. Penyebab tidak tercapainya target karena target terlalu tinggi sedangkan jumlah riil odgj di Konawe Utara hanya 61 orang. Selain itu Kurangnya Kesadaran keluarga penderita ODGJ berat untuk berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ,karena merasa dikucilkan dan tidak mempunyai kartu keluarga dan Kartu BPJS dan pelaporan kesehatan jiwa melalui aplikasi simkeswa di mana sering terjadi pergantian programer di puskesmas. Indikator ini merupakan turunan dari indikator Persentase Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar jadi sekaligus menjawab indikator tersebut.

## 5. 9 indikator kinerja dengan predikat Kurang Berhasil

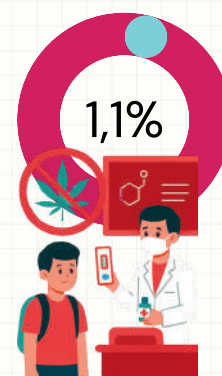
Insidensi HIV per 100.000 Penduduk 74,12 (0%) Hanya ada 1 Kasus. Rendahnya capaian disebabkan karena banyak warga ber-KTP konawe utara yang memilih pengobatan diluar wilayah Konawe Utara, sementara PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan) bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sudah dapat diakses dikonawe utara. salah satu penyebabnya adalah masalah privasi dan malu diketahui warga setempat.



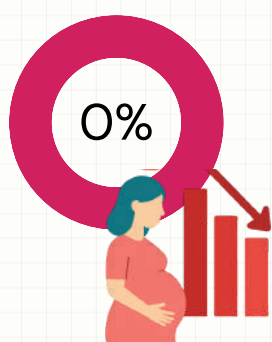
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman hanya sebesar 0,28% (0.93%). Dari total sasaran sebanyak 21.449 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Kabupaten Konawe Utara tahun 2025, tercatat hanya 61 KK yang memiliki akses sanitasi aman. Penyebab tidak tercapainya karena masih adanya rumah tangga yang belum memiliki sarana sanitasi aman, keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi geografis dan lingkungan yang menyulitkan pembangunan sarana sanitasi.



Indikator Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA mencapai 1%, dengan realisasi 160 orang dari target 14.000. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh penetapan target yang tidak proporsional dengan kapasitas sumber daya, ketiadaan data dasar (baseline) peta risiko yang akurat di sekolah dan fasyankes, serta keterbatasan stok Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) seperti alat rapid test narkoba di lapangan.



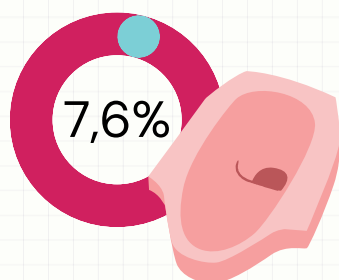
Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat sebesar 0% dari target yang ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target ambisius sebesar 0 per 100.000 kelahiran hidup, namun realisasi di lapangan menunjukkan angka 152,2 per 100.000 kelahiran hidup. Terdapat 2 kasus kematian ibu dari total 1.314 kelahiran hidup. Penyebab tidak tercapai karena adanya hambatan dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun saat penanganan awal di fasilitas kesehatan, yang mengakibatkan keterlambatan rujukan dan belum Tersedianya Bank Darah.

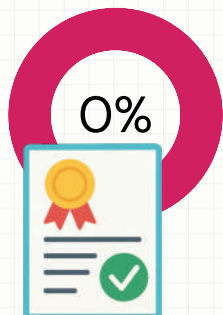


Indikator Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria hanya sebesar 5%. Dari target sasaran sebanyak 124 orang, realisasi pelayanan yang tercapai hanya menjangkau 6 orang. Kegagalan dalam mencapai target dipengaruhi karena kosongnya stok logistik Rapid Diagnostic Test (RDT) selama tahun 2025, yang menghambat proses skrining dan deteksi dini. Penetapan target sebesar 124 orang sedangkan kondisi riil hanya 6 kasus menunjukkan bahwa angka kejadian malaria di lapangan memang jauh lebih rendah daripada estimasi target yang ditetapkan.



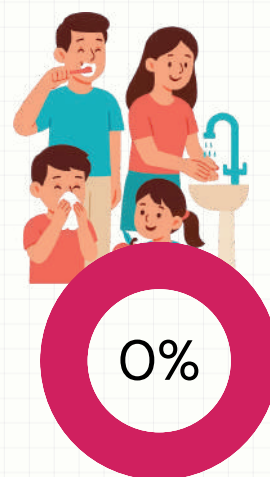
Indikator Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat hanya mencapai 7,59%. Dari target sebesar 59,5%, realisasi di lapangan menunjukkan angka yang sangat rendah yaitu 4,52%. Dari total 199 unit TPP yang ada, tercatat hanya 9 unit TPP yang telah memenuhi syarat kesehatan dan standar yang ditetapkan. Penyebab target tidak tercapai masih rendahnya kepatuhan pengelola terhadap standar hygiene dan sanitasi pangan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kurangnya pengetahuan penjamah pangan.





Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Indikator ini tercatat sebesar 0%. Tidak mencapai target karena Tidak Ada Realisasi Kegiatan: Adanya anggaran yang sudah disiapkan namun tidak termanfaatkan hingga periode laporan berakhir.

Indikator penumbuhan kesadaran keluarga dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tercatat sebesar 0%. Dari target sasaran yang ditetapkan sebanyak 14.000 Keluarga, realisasi yang tercapai di lapangan hanya menjangkau 60 Keluarga. Penyebab tidak tercapainya target keterbatasan anggaran operasional dimana dukungan dana untuk kegiatan kunjungan rumah (door-to-door) atau penggerak massa melalui kader desa belum memadai untuk mencakup target yang besar. Sehingga hanya cukup untuk 60 keluarga selain itu adanya efisiensi anggaran.



### 3.8 Capaian Kinerja Lainnya



Dalam rangka menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, pelaksanaan SPM di Kabupaten Konawe Utara dipandu oleh PMK No. 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Aturan ini menekankan bahwa pemenuhan SPM bukan hanya diukur dari cakupan kuantitas sasaran, melainkan harus memenuhi aspek Kualitas Layanan (SDM, sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat-obatan) sesuai standar teknis yang ditetapkan. Berdasarkan PMK tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan 12 (dua belas) Jenis Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan bagi masyarakat, sebagai berikut:



**Tabel 3.7** Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No.	Indikator SPM Bidang Kesehatan	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	1679	1364	81,24
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	1675	1318	78,69
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	1590	1315	82,70
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	6251	6010	96,14
5.	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Orang	4739	4620	97,49
6.	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Orang	47931	34312	71,59
7.	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Orang	4467	4386	98,19
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	15507	9064	58,45
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	795	1289	100
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Orang	98	61	62,24
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	1296	1632	100
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Orang	1678	1352	80,57

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Kabupaten Konawe Utara tahun 2025 menunjukkan capaian yang beragam di antara dua belas indikator wajib. Secara umum, efektivitas pelayanan dasar sangat dipengaruhi oleh sarana prasarana dan dukungan operasional di tingkat Puskesmas. Indikator yang berkaitan dengan pengendalian penyakit menular,

seperti pelayanan penderita Diabetes Melitus dan Terduga Tuberkulosis, telah menunjukkan keberhasilan yang optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem pelacakan kasus dan ketersediaan logistik obat-obatan untuk kedua program tersebut telah berjalan sesuai dengan standar teknis nasional. Pelayanan Kesehatan Ibu (ANC), Balita, dan Anak Sekolah menunjukkan capaian cukup baik



berkat meningkatnya kesadaran masyarakat serta ketersediaan alat seperti USG di Puskesmas. Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) dan kuesioner KPSP terbukti efektif mendeteksi dini tumbuh kembang anak secara rutin di Posyandu.

Sinergi lintas sektor melalui program BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) juga memperkuat cakupan perlindungan kesehatan dasar pada usia pendidikan. Meskipun deteksi dini TB dan ODGJ meningkat, target maksimal belum tercapai akibat rendahnya kepatuhan pasien dan kurangnya inovasi keluarga sebagai Pengawas Menelan Obat (PMO). Pada kasus HIV, meski layanan pengobatan (PDP) sudah tersedia secara lokal, privasi dan stigma sosial masih membuat pasien enggan berobat di wilayah sendiri. Sementara untuk ODGJ, hambatan utama adalah ketidakpadanan data kependudukan (KK/BPJS) yang menghambat akses pengobatan gratis.

Indikator Lansia dan Penyakit Tidak Menular (Hipertensi/Usia Produktif) mengalami tantangan besar akibat kebijakan efisiensi pemangkasan anggaran, yang membatasi mobilitas petugas dan skrining luar gedung.

Selain itu, belum tersedianya tenaga medis terlatih Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi lansia serta keterbatasan alat stimulasi SDIDTK. Ke depan, diperlukan kebijakan perlindungan anggaran SPM agar tidak terkena efisiensi anggaran. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan peremajaan data kependudukan secara aktif (jemput bola) serta pengadaan sarana digital dan kendaraan operasional guna memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu.





### 3.8 Akuntabilitas Keuangan



Akuntabilitas keuangan merupakan melaporkan aktivitas pelaporan keuangan pemerintah mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan penggunaannya sesuai peruntukan didama dalam hal ini diperuntukkan untuk bidang kesehatan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara memerlukan sumberdaya bukan hanya manusia tetapi juga sumber daya berupa anggaran. Kemudian anggaran yang telah dialokasikan dan digunakan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Alokasi Anggaran secara keseluruhan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Tahun 2025 adalah Rp133.496.333.419,37.



Secara umum realisasi anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 sangat tinggi yaitu sebesar 91,26%. Penyerapan anggaran yang kurang maksimal disebabkan oleh pengajuan anggaran yang terlambat serta proses persetujuan yang memakan waktu yang lama.





**Tabel 3.8** Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran Startegis

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	65.087.435.742,44	58.781.694.885	90,31%
1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	36.272.825.618,44	33.110.950.973	91,28%
Pembangunan Puskesmas	3.000.006.162	2.910.130.160	97%
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	16.800.012.802	13.932.481.100	82,93%
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	400.010.318	321.715.200	80,43%
Pengembangan Puskesmas	2.299.439.678	2.295.470.401	99,83%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	3.457.035.807	3.436.170.000	99,40%
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.254.968.000	2.240.423.992	99,36%
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan minuman di Fasilitas Kesehatan	7.453.628.000	7.384.501.270	99,07%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	311.501.250	311.216.250	99,91%
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	17.300.000	-	0%
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	278.923.600	278.842.600	99,97%
2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.805.610.124	25.661.767.912	89,09%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	182.041.000	163.753.000	89,95%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	38.492.800	38.456.000	99,90%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	87.001.000	65.022.846	74,74%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	31.540.500	31.531.000	99,97%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	87.711.600	87.709.000	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	19.278.000	19.278.000	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	35.973.000	26.593.000	73,92%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	38.556.000	38.556.000	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	19.278.000	19.278.000	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	38.556.000	38.556.000	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	334.772.200	325.179.200	97,13%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100.776.500	91.314.000	90,61%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	17.300.000	17.300.000	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	9.000.000	4.775.000	53,06%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	862.486.700	724.413.000	83,99%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.000.000	9.000.000	100%



Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	934.242.000	816.408.440	87,39%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	176.668.900	176.668.900	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	9.000.000	9.000.000	100%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.278.000	19.278.000	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	9.000.000	9.000.000	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	9.000.000	9.000.000	100%
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	9.000.000	0	0%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	471.768.000	409.327.302	86,76%
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.620.355.438	13.009.459.900	88,98%
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	18.000.000	18.000.000	100%
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	9.000.000	-	0%
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9.000.000	9.000.000	100%
Operasional Pelayanan Puskesmas	9.970.009.086	8.898.284.524	89,25%
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	208.390.000	207.753.600	99,69%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	92.164.000	92.164.000	100%
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	79.812.000	79.812.000	100%
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	9.000.000	8.976.000	99,73%
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	25.704.000	12.852.000	50,00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	19.278.000	19.278.000	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	25.924.200	25.924.200	100%
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	142.253.200	106.817.000	75,09%
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	9.000.000	6.750.000	75,00%
Pengelolaan Layanan Imunisasi	9.000.000	8.300.000	92,22%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	9.000.000	9.000.000	100%
<b>3</b> Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	9.000.000	8.976.000	99,73%
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	9.000.000	8.976.000	99,73%
<input checked="" type="checkbox"/> PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.428.748.470	1.400.879.600	98,05%
<b>1</b> Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	18.000.000	17.996.000	99,98%
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	9.000.000	8.998.000	99,98%
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	9.000.000	8.998.000	99,98%



Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	477.661.700	451.055.250	94,43%
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.000.000	9.000.000	100%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	275.289.000	275.289.000	100%
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	193.372.700	166.766.250	86,24%
3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	933.086.770	931.828.350	99,87%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	933.086.770	931.828.350	99,87%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	114.390.000	105.390.000	92,13%
1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	9.000.000	9.000.000	100%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	9.000.000	9.000.000	100%
2 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	9.000.000	-	0%
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	9.000.000	-	0%
3 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	96.390.000	96.390.000	100%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	96.390.000	96.390.000	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	737.211.976,50	677.539.566	91,91%
1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	441.641.800	439.769.410	99,58%
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	441.641.800	439.769.410	99,58%
2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	243.547.051,50	185.747.156	76,27%
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	234.547.051,50	176.753.156	75,36%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	9.000.000	8.994.000	99,93%
3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.023.125	52.023.000	100%
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	52.023.125	52.023.000	100%

Sumber: SPJ Fungsional Dinas Kesehatan, 2025





Selanjutnya dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja dan juga pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025, beberapa anggaran kegiatan program lainnya, adalah:

**Tabel 3.9** Realisasi Anggaran Lainnya

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.278.656.634,13	38.187.485.592	92,51%
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.314.900	162.498.200	91,13%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.277.400	44.003.400	99,38%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.138.700	12.138.700	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	15.538.700	0	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.197.400	15.197.400	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.162.700	91.158.700	100%
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.421.156.850,80	31.605.437.572	91,82%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.062.839.850	31.274.151.572	91,81%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	213.840.000	186.810.000	87,36%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	144.477.000	144.476.000	100%
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	683.867.700	671.795.880	98,23%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15.438.700	11.889.600	77,01%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	256.066.000	255.342.780	99,72%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.438.700	20.315.700	99,40%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	256.099.400	256.099.400	100%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	113.688.700	113.679.700	99,99%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.447.500	0	0%
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	14.688.700	14.468.700	98,50%
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.002.700	242.072.030	96,44%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	197.174.000	197.141.000	99,98%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.150.000	16.450.000	95,92%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.990.000	13.792.330	62,72%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.688.700	14.688.700	100%
5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.188.500.081	3.188.500.000	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.188.500.081	3.188.500.000	100%
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.201.428.500	1.967.181.910	89,36%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.201.428.500	1.967.181.910	89,36%
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.385.902	350.000.000	98,76%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.316.000	350.000.000	99,91%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.069.902	0	100%

Sumber: SPJ Fungsional Dinas Kesehatan, 2025





**Tabel 3.10** Realisasi Anggaran RSUD Konawe Utara

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.542.265.629	7.277.250.666	30,91%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.111.300	53.111.300	100,00%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.175.700	29.175.700	100,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.035.300	14.035.300	100,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.672.400	8.672.400	100,00%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.468.000	6.468.000	100,00%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.935.600	23.935.600	100,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.355.600	3.355.600	100,00%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.580.000	20.580.000	100,00%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.298.904.462	4.130.346.194	77,95%
1.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	5.166.884.462	3.998.356.194	77,38%
	Belanja Gaji Pokok PNS	4.113.681.225	3.179.824.100	77,30%
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	316.811.438	248.851.166	78,55%
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	36.765.000	23.580.000	64,14%
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	439.415.000	339.890.000	77,35%
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18.992.500	15.635.000	82,32%
	Belanja Tunjangan Beras PNS	225.316.725	174.894.300	77,62%
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.837.734,25	15.636.370	98,73%
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	64.840	45.258	69,80%
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132.020.000	131.990.000	99,98%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.671.000	4.645.000	99,44%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.789.000	8.785.000	99,95%
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	118.560.000	118.560.000	100,00%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	886.614.820,00	872.900.000,00	98,45%
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	499.660.900,00	497.800.000,00	99,63%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	-	#DIV/0!





No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	198.726.200,00	198.000.000,00	99,63%
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-	#DIV/0!
	Belanja Pakaian Adat Daerah	199.014.400,00	198.800.000,00	99,89%
	Belanja Pakaian Olahraga	101.920.300,00	101.000.000,00	99,10%
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	386.953.920,00	375.100.000,00	96,94%
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12.000.000,00	5.940.000,00	49,50%
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	369.013.920,00	367.040.000,00	99,47%
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.940.000,00	2.120.000,00	35,69%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	762.979.717,00	700.533.921,00	91,82%
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	204.452.517,00	204.343.910,00	99,95%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	114.282.000,00	114.243.910,00	99,97%
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	90.170.517,00	90.100.000,00	99,92%
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.623.900,00	103.758.500,00	86,74%
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	29.806.000,00	29.000.000,00	97,30%
	Belanja Modal Mebel	53.937.600,00	40.515.000,00	75,11%
	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	6.115.900,00	5.994.000,00	98,01%
	Belanja Modal Personal Computer	21.109.200,00	19.980.000,00	94,65%
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.655.200,00	8.269.500,00	95,54%
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.760.000,00	130.750.000,00	99,99%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73.304.000,00	73.300.000,00	99,99%
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	57.456.000,00	57.450.000,00	99,99%
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	96.204.300,00	96.200.000,00	100,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	96.204.300,00	96.200.000,00	100,00%
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	211.939.000,00	165.481.511,00	78,08%
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	171.290.000,00	137.742.511,00	80,41%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.649.000,00	27.739.000,00	68,24%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.618.612,00	32.295.000,00	88,19%
1.5.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	36.618.612,00	32.295.000,00	88,19%
	Belanja Modal Alat Pembersih	11.123.532,00	11.100.000,00	99,79%
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.495.080,00	21.195.000,00	83,13%



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	877.919.918,00	866.883.783,00	98,74%
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	377.919.918,00	367.473.383,00	97,24%
	Belanja Tagihan Listrik	297.579.918,00	296.429.200,00	99,61%
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	80.340.000,00	71.044.183,00	88,43%
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	500.000.000,00	499.410.400,00	99,88%
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	500.000.000,00	499.410.400,00	99,88%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	626.116.800,00	621.180.468,00	99,21%
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	426.633.800,00	424.574.688,00	99,52%
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	229.563.800,00	227.530.530,00	99,11%
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	82.410.000,00	82.400.000,00	99,99%
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	114.660.000,00	114.644.158,00	99,99%
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	131.233.000,00	131.233.000,00	100,00%
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	131.233.000,00	131.233.000,00	100,00%
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	68.250.000,00	65.372.780,00	95,78%
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	59.490.000,00	59.489.780,00	100,00%
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.760.000,00	5.883.000,00	67,16%
1.8	Peningkatan Pelayanan BLUD	15.000.000.000,00	-	0,00%
1.8.1	Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD	15.000.000.000,00	-	0,00%
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	13.780.000.000,00	-	0,00%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	700.000.000,00	-	0,00%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	-	0,00%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	120.000.000,00	-	0,00%
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.347.147.227,00	7.303.078.532,00	99,40%
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.871.971.919,00	2.855.085.522	99,41%

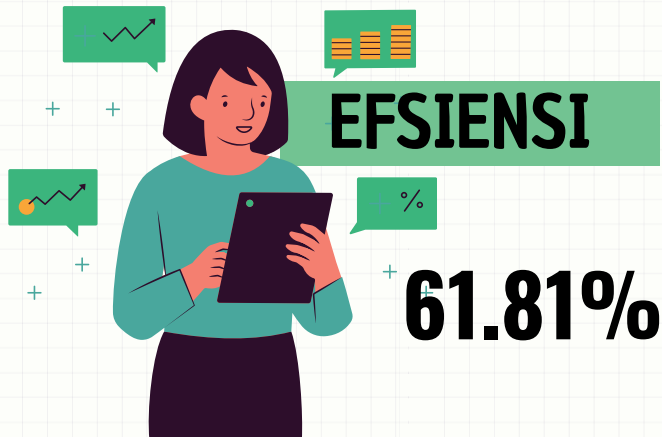


No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
2.1.1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.985.543.219	1.974.194.334	99,43%
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.985.543.219	1.974.194.334,00	99,43%
2.1.2	Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	145.435.100	144.832.791,00	99,59%
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	109.890.000	109.889.991,00	100,00%
	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	35.545.100	34.942.800,00	98,31%
2.1.3	Pengembangan Rumah Sakit	-	-	#DIV/0!
	Belanja Modal Instalasi Lain	-	-	#DIV/0!
2.1.4	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan	740.993.600	736.058.397,00	99,33%
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	404.048.400	400.650.670,00	99,16%
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	79.126.600	77.684.254,00	98,18%
	Belanja Obat-Obatan-Obat	257.818.600	257.723.473,00	99,96%
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.415.175.308	4.387.993.010,00	99,38%
2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	461.475.308	450.043.010,00	97,52%
	Belanja Pengolahan Air Limbah	386.691.500	378.785.560,00	97,96%
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	59.940.000	56.500.000,00	94,26%
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.843.808	14.757.450,00	99,42%
2.2.2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.953.700.000	3.937.950.000,00	99,60%
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.506.100.000	3.506.100.000,00	100,00%
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	123.600.000	123.600.000,00	100,00%
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	162.000.000	157.500.000,00	97,22%
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	162.000.000	150.750.000	93,06%
2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	60.000.000	60.000.000	100,00%
2.3.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	60.000.000	60.000.000	100,00%
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	60.000.000	60.000.000,00	100,00%
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.028.000.000	3.005.000.000	99,24%
3.1	Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Di Wilayah Kabupaten/Kota	3.028.000.000	3.005.000.000	99,24%
3.1.1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	3.028.000.000	3.005.000.000	99,24%
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.028.000.000	3.005.000.000	99,24%





### 3.9 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.



- Anggarannya baru cair di akhir tahun sehingga kegiatan menumpuk.
- Kendala pada proses pencairan anggaran. Durasi waktu penyelesaian administrasi keuangan yang melampaui estimasi jadwal pelaksanaan. Proses verifikasi dokumen yang bersifat berjenjang serta adanya penyesuaian teknis pada sistem aplikasi pelaporan keuangan mengakibatkan tertundanya penerbitan (SP2D).

- Beberapa kegiatan tidak terealisasi, yang secara otomatis menurunkan persentase rata-rata penyerapan.
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN menyisakan sekitar Rp2,7 M. Karena adanya pegawai yang pindah dan pensiun.
- Pembangunan Fasilitas Kesehatan menyerap 82,93%. Terdapat sisa anggaran sekitar Rp2,8 M, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan terserap 80.43%, disebabkan hambatan dalam penyelesaian kontrak, sisa anggaran, keterlambatan progres fisik di lapangan.
- Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
- Penghematan Anggaran (Efisiensi).

**Tabel 3.11** Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran	Indikator dengan % Capaian Kinerja (> 100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
S1.1 Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (106.97%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (90.31%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (16.66%)
S1.2 Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan (0%)	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan (106.97%)
Rata-Rata Kinerja	106.97%	90.31%	61.81%



Berdasarkan Rancangan Strategis (Renstra) 2025–2029, indikator **Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)** secara konseptual berada di bawah Sasaran 1.2 Peningkatan Akses dan Mutu pada Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan. Namun, mengingat Program Akreditasi merupakan nomenklatur baru yang keluar saat proses penyusunan Renstra berjalan, sistem penganggaran nasional (SIPD) tahun 2025 belum mengakomodasi program tersebut dalam perubahan anggaran maupun DPA berjalan.

Sebagai langkah strategis untuk menjaga akuntabilitas dan prinsip *Money Follow Program*, realisasi kinerja JKN sebesar 106,97% dilaporkan pada Sasaran 1.1 Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Hal ini didasarkan pada fakta objektif bahwa seluruh dukungan anggaran iuran PBI APBD dan sub-kegiatan jaminan kesehatan secara riil melekat pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Penggabungan ini bertujuan agar perhitungan tingkat efisiensi anggaran dilakukan secara linier antara input (dana yang terpakai) dan output (cakupan peserta yang terlayani).

Nilai rata-rata Efisiensi Anggaran sebesar 61,81% merupakan representasi dari penyelarasan program-program kesehatan dalam masa transisi nomenklatur. Pencantuman Program Akreditasi (S1.2) dalam tabel tetap dipertahankan sebagai bentuk transparansi terhadap perencanaan Renstra, meskipun realisasi anggaran dan kinerjanya dialihkan ke program yang tersedia (Program UKP/UKM) guna menghindari ketidaksinkronan perhitungan pada sistem evaluasi kinerja.

Langkah administratif ini diambil guna memastikan bahwa pencapaian kinerja yang melampaui target tetap dapat diukur efisiensinya terhadap serapan anggaran yang ada, sehingga tidak terjadi bias data dalam penilaian SAKIP maupun evaluasi capaian Kabupaten Konawe Utara.



### 3.10 Inovasi

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah menjadi sangat penting karena dapat mempercepat pencapaian target. Adapun inovasi yang telah dilakukan dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, antara lain sebagai berikut:

Inovasi pada Puskesmas Asera berupa: POJOK ROKOK, penyediaan area terbatas (*smoking area*) yang ditempatkan di sudut luar rumah atau area publik tertentu. Untuk meminimalisir paparan asap rokok terhadap anggota keluarga, Jemput dan antar pasien ibu bersalin agar berobat di fasyankes, Gerakan mama peduli imunisasi yaitu diberikannya sertifikat vaksin imunisasi lengkap kepada anak yang lengkap imunisasi dan Gerakan peduli hipertensi dan diabetes merupakan upaya pencegahan bagi penderita hipertensi dan diabetes.



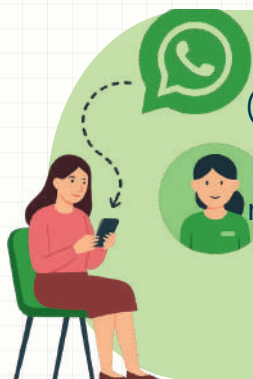
#### PREGNANCY CLASS



Inovasi pada Puskesmas Lamparanga berupa: Sekolah bebas anemia, Telekonsultasi Dasar via Whatsapp, Kelas Ibu dan Kelas Remaja Sehat, Kunjungan Rumah Terpadu, dan Kotak Saran Digital/QRCode.

Inovasi pada Puskesmas Molawe berupa: GERCEP BUNDA (Gerakan Cepat Bidan untuk Ibu Hamil dan Bersalin) kegiatannya berupa Penyediaan grup WA Bumil dan kontak bidan 24 jam untuk konsultasi dan permintaan bantuan, Penyediaan Layanan Ambulans (antar jemput pasien bersalin gratis) dan Kunjungan rumah pasca persalinan untuk pemantauan kondisi ibu dan bayi.





Inovasi Puskesmas Langgikima Pesisir berupa: Kunjungan aktif (jemput bola) bagi ibu hamil risiko tinggi, balita stunting, dan lansia yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Kegiatan ini bertujuan memastikan pelayanan tetap diterima oleh kelompok rentan. Inovasi lainnya adalah pemanfaatan grup komunikasi desa (WhatsApp/koordinasi kader) untuk pemantauan ibu hamil, pengingat imunisasi, serta edukasi kesehatan secara cepat dan berkelanjutan.

Inovasi pada Puskesmas Andowia berupa: Pemeriksaan kesehatan gratis *door to door*/kunjungan rumah, Pojok Laktasi, Pemanfaatan Grup WhatsApp Sekolah dan Desa untuk Informasi Kesehatan dan Pelaporan Cepat, Surat Cinta (Surat Catatan Imunisasi Dasar dan Lanjutan untuk Kunjungan Ulang), Kunjungan Rumah/*homecare* pada lansia yang tidak bisa ke puskesmas atau posyandu, SIGAP BUNDA (Siaga Antar Persalinan Ibu dan anak).



Inovasi pada Puskesmas Landawe berupa: Gertu Janda (Gerakan Patuh Jaga Tekanan Darah), *Homecare* ODGJ Resiko tinggi, PIONIR (Pelayanan Informasi Obat yang Informatif dan Rasional), RINDU KIA (Beri Informasi dan Edukasi tentang Kesehatan Ibu dan Anak), PELANGI (Pelayanan Lansia dengan Resiko Tinggi), dan PELAN SAJA (Pelayanan Lansia Sehat dan Sejahtera).



Inovasi pada Puskesmas Tetewatu berupa: Pelayanan USG Gratis, Melaksanakan *sweeping door to door* pada anak balita yang tidak datang pada saat jadwal posyandu di laksanakan dalam rangka pemenuhan IDL (Imunisasi Dasar Lengkap), Pengukuran Berat Badan, TB, DII





Inovasi pada Puskesmas Wanggudu Raya berupa: AJI ALIS (Antar Jemput Ibu Bersalin Gratis), BEKAS CINTA (Bidan Kunjungan Nifas Cegah Kematian Ibu dan Anak).

Inovasi pada Puskesmas Laronanga Pantai berupa: JELAS (Jemput Langsung Dahak/Sampel) di rumah pasien. dan SIMAMAH (Sweeping Imunisasi Rumah ke Rumah).



Inovasi pada Puskesmas Langgikima berupa: AJENTIS (Antar Jemput Pasien Gratis) dimana Bidan Desa Menjemput Pasien yang akan melahirkan menggunakan Mobil Ambulance sehingga setiap persalinan normal dan abnormal dapat ditangani dengan cepat dan tepat, BALE BENGONG ( Pojok Merokok ) dan JUWARA (Jumat Warakah).

Pemanfaatan Microsoft Excel, Google Form dan Google Spreadsheet untuk Pengelolaan Data dan pengumpulan data berbasis internet dari Puskesmas kepada Programmer Dinas Kesehatan, selain itu mempercepat dalam pengumpulan data secara real-time.



### 3.11 Kolaborasi Lintas Sektor

Untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara dibutuhkan kerjasama atau kolaborasi lintas sector dengan berbagai pemangku kepentingan baik dari sisi internal Pemerintah Kabupaten/Kota itu sendiri maupun pihak-pihak dari luar sebagai pemangku kepentingan (*Stakeholders*).



Dalam upaya pencapaian kinerja Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan mitra perangkat daerah yang lain maupun dengan pihak lain yang berkompeten dalam upaya pencapaian target kinerja. Adapun kolaborasi lintas sektor yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, antara lain sebagai berikut:

### PT. Infokes Indonesia

Kerjasama menyediakan sistem Rekam Medis Elektronik (ePuskesmas) di seluruh puskesmas Kabupaten Konawe Utara yang memenuhi standar Kementerian Kesehatan, melakukan implementasi dan pendampingan di fasilitas kesehatan (Fasyankes), serta melakukan pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk memastikan transisi ke sistem RME berjalan lancar dan efektif.

### Universitas Nusa Cendana

Melakukan MOU dengan Universitas Nusa Cendana dalam rangka pendampingan penyusunan RENJA Dinas Kesehatan.

### PT. Mitra Hijau Asia

Kerjasama dalam rangka pengangkutan, pengumpulan, dan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

### BAPELKES PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Melakukan MOU dengan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM.

### Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah (SD, SMP, SMA/SMK)

Dukungan promosi dan kebijakan pendidikan kesehatan disekolah termasuk kesehatan reproduksi, implementasi aksi bergizi. Penguatan program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). Skrining kesehatan berkala dan pencegahan anemia pada remaja putri (pemberian TTD). Edukasi dini mengenai pola hidup bersih dan sehat (PHBS).



Koordinasi data kesehatan dan penanganan stunting.

### KEMENAG

Dukungan kebijakan dan implementasi peningkatan kesehatan calon pengantin. Mengadakan MOU dengan KUA tentang pelayanan Elsimil serta mengadakan MOU untuk tidak melaksanakan pernikahan dibawah umur dan Tetatanus Toksid Catin.

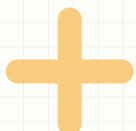
### BPJS KESEHATAN

Kerjasama antara BPJS Kesehatan Kabupaten Konawe Utara dengan Dinas Kesehatan dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat.

### Stakeholders

Bekerja sama dengan Kepala Desa/Lurah, Camat, Kader, PKK

- Pelaksanaan Lokakarya Mini (Linsek) rutin secara terstruktur.
- Advokasi dukungan Dana Desa untuk intervensi kesehatan (PMT, Jambanisasi, penanganan stunting).
- Rapat koordinasi formal maupun informal untuk membahas derajat kesehatan masyarakat.





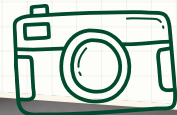
Cek Kesehatan Gratis  
untuk Anak Sekolah oleh  
Puskesmas Motui



KILAS BALIK  
2025



Cek Kesehatan Gratis di Desa  
yang dilakukan oleh Puskesmas  
Andowia



Pertemuan Rapat Koordinasi  
BPJS Kesehatan beserta Dinas  
Kesehatan



Pembagian pengadaan sarana dari  
Dinas Kesehatan ke Puskesmas



Pemeriksaan Sampel  
Makanan oleh Progammer  
Kesehatan Lingkungan  
Dinas Kesehatan





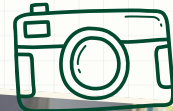
Pertemuan Koordinasi dan Advokasi Perencanaan Kelompok Kerja Operasional Posyandu dalam Posyandu Prima dan ILP



KILAS BALIK 2025



Distribusi Obat dan Vaksin dari Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan ke Puskesmas



Monitoring dan Evaluasi Izin Apotek dan Toko Obat



Monitoring dan Evaluasi Mutu Pelayanan di Puskesmas



Pelaksanaan Imunisasi oleh Bidang P2P





# Bab IV

## Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara pada Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 2 (Dua) sasaran dinas kesehatan **Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat dan Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan**, terdapat 3 (Tiga) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2025, 2 (Dua) indikator sasaran yang telah memenuhi target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Tinggi**. Serta ada 1 (Satu) indikator dengan kategori **Tinggi**. Dengan rata-rata kinerja adalah **96.68% kategori Sangat Tinggi**.
2. Dari hasil analisis indikator kinerja program Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara dari **107 indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan** yang dinilai, **82 indikator kinerja berpredikat Sangat Tinggi**, **10 indikator kinerja berpredikat Tinggi**, **2 indikator kinerja berpredikat Sedang**, **4 indikator kinerja berpredikat Rendah** dan **9 indikator kinerja dengan predikat Kurang Berhasil** dan 2 Indikator yang tidak terealisasi.
3. Realisasi kinerja anggaran (keuangan) Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2025, sangat tinggi yaitu sebesar **Rp. 99.152.989.643 (91,26%)**.
4. Rata-rata kinerja dari indikator kinerja dengan % capaian kinerja (>100%) adalah **106.97%** penyerapan anggaran dari program pendukung sasaran strategis adalah sebanyak **90.31%** dan tingkat efisiensi formulasi 2 (dua) angka tersebut adalah **61.81%**.





### Langkah-langkah perbikan kinerja Dinas Kesehatan kedepannya:

- Melakukan pemantauan rutin dan pengendalian khusus pada unit kerja yang memiliki indikator dengan capaian masih rendah dan sangat rendah atau di bawah target.
- Intervensi prioritas pada pelayanan yang masih berada di warna kuning, merah atau oranye, seperti seperti Akses Sanitasi Aman, Deteksi Dini NAPZA, dan Pelayanan Malaria. Pelayanan Hipertensi dan Pelayanan ODGJ Berat agar tidak menghambat capaian organisasi secara keseluruhan.
- Mengawal pencapaian sasaran utama organisasi dengan memastikan setiap kegiatan berdampak langsung pada masyarakat.
- Mengevaluasi kembali penetapan target agar lebih realistis, terutama pada indikator yang realisasinya jauh melampaui target awal guna perencanaan anggaran yang lebih akurat di masa depan.
- Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengelolaan data, baik melalui pencatatan manual maupun aplikasi guna menghindari kesalahan input seperti nilai kosong atau status #DIV/0! pada laporan.
- Memastikan data yang masuk akurat dan tepat waktu untuk menghindari kesalahan laporan agar keputusan pimpinan lebih efektif dan efisien.
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi kesehatan terintegrasi di seluruh Puskesmas untuk meminimalkan kehilangan data (loss of data) dan mempercepat pelaporan.
- Menggunakan data capaian riil sebagai dasar perencanaan dan penganggaran agar lebih efektif serta efisien bagi program kerja tahun berikutnya.
- Melakukan evaluasi kinerja secara rutin untuk mendeteksi kendala lapangan lebih awal, sehingga penyerapan anggaran dapat dilakukan secara tepat sasaran.
- Memastikan setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga penganggaran kegiatan terpantau dengan jelas sehingga penggunaan anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.

